

**ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT EFISIENSI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2018-2022**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Alvino Ramadhana Mukti Pratama

No. Mahasiswa : 20312020

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

**ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT EFISIENSI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama : Alvino Ramadhana Mukti Pratama

No. Mahasiswa : 20312020

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Aze Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 2163/Ka.Div/10/Div.PP/VII/2025

Bismillaahirrahmaanirrahim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Alvino Ramadhana Mukti Pratama**
Nomor Mahasiswa : **20312020**
Dosen Pembimbing : **Arief Rahman, S.I.P., S.E., M.Com., Ph.D.**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Karya Ilmiah : **Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Efisiensi Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**
Nomor HP : **08122698983**

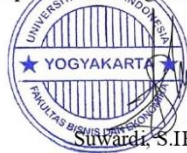
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **2% (dua persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 23 Juli 2025

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,



Suwardi, S.I.P., M.IP

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT EFISIENSI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2018-2022

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Alvino Ramadhana Mukti Pratama

No. Mahasiswa : 20312020

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing

(Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nomor: 300/Ka.ProdiAkt/10/Prodi.Ak/US/VII/2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2024/2025, hari Senin, tanggal 04 Agustus 2025, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ALVINO RAMADHANA MUKTI PRATAMA
NIM : 20312020
Judul Tugas Akhir : ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT EFISIENSI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2018-2022
Dosen Pembimbing : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : B+
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D
Anggota Tim : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 04 Agustus 2025

Ketua Program Studi Akuntansi,



Prof. Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS
NIK. 033120104

MOTTO

” Hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan, tapi perjalanan yang harus dinikmati dengan hati yang tenang serta ikhlas, percayalah kawan semua akan indah pada waktunya”

(Alvino Ramadhana Mukti Pratama)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya tulis ini kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan skripsi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT EFISIENSI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2022”. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Peneliti sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi ini mengalami banyak kendala. Berkat dukungan dari berbagai pihak, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan, nikmat, dan karunia- Nya
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan umat muslim
3. Kedua orang tua penulis
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Rifqi Muhammad S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

7. Bapak Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D. Ketua Program Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, juga serta selaku dosen pembimbing skripsi peneliti yang sangat membantu dan sabar dalam memberikan ilmu, arahan selama peneliti menulis skripsi, sehingga dapat menyelesaikan proses menulis skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Sahabat dan teman peneliti yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis sadar, dalam proses penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis,

Alvino Ramadhana Mukti Pratama

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	3
LEMBAR PENGESAHAN.....	4
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI	5
MOTTO	6
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	7
KATA PENGANTAR.....	8
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL	13
DAFTAR GAMBAR.....	14
ABSTRAK.....	15
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Teori.....	10
2.1.1 Teori Keagenan.....	10
2.1.2 Pengelolaan Penerimaan Pendapatan	11
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	12
2.1.4 TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa)	12
2.1.5 Belanja Modal	13
2.1.6 SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)	14

2.2	Pengembangan Hipotesis	18
2.2.1	Pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan.....	18
2.2.2	Pengaruh TKDD terhadap kinerja keuangan	19
2.2.3	Pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan	20
2.2.4	Pengaruh SiLPA terhadap kinerja keuangan	22
2.2.5	Kerangka Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN		25
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	25
3.2	Teknik Pengumpulan Data	25
3.3	Pengukuran Variabel Penelitian.....	25
3.3.1	Variabel Dependen.....	26
3.3.2	Analisis Efisiensi	26
3.4	Variabel Independen	27
3.4.1	Pendapatan Asli Daerah	27
3.4.2	Belanja Modal	28
3.4.3	Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD)	28
3.4.4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).....	28
3.5	Teknik Analisis Data.....	29
3.5.1	Metode dan alat analisis data	29
3.5.2	Analisis Regresi Data Panel	29
3.5.3	Model Penelitian.....	30
3.5.4	Model Common Effect	31
3.5.5	Model Fixed Effect	31
3.5.6	Model Random Effect.....	32
3.5.7	Uji Chow	32

3.5.8	Uji Hausman.....	33
3.6	Uji hipotesis.....	34
3.6.1	Uji koefisien determinasi	34
3.6.2	Uji T	35
3.6.3	Uji F	35
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Deskripsi data	37
4.2	Analisis Data	37
4.3	Analisis Efisiensi	38
4.4	Analisis Data Panel.....	49
4.5	Analisis Model Penelitian	53
4.6	Analisis Fixed Effect.....	55
4.7	Analisis Random Effect	57
4.8	Uji Chow	58
4.9	Uji Hausman.....	60
4.10	Uji Hipotesis.....	63
4.10	Uji Multikolinearitas	74
DAFTAR PUSTAKA.....		81
LAMPIRAN		83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.2 Kerangka Penelitian	24
Tabel 3. 1 Tabel Variabel Penelitian	25
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kinerja.....	27
Tabel 4.1 Nama Kota dan Pusat Pemerintahan pada Tahun 2018-2022.....	40
Tabel 4.2 Data Panel	50
Tabel 4.3 Uji Hipotesis	63
Tabel 4.4 Koefisien Determinasi.....	64
Tabel 4.5 Uji T	67
Tabel 4.6 Uji F	70
Tabel 4.7 Uji Normalitas	72
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Analisis Efisiensi.....	38
Gambar 4.2 Analisis Panel	49

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2022. Efisiensi diukur melalui pendekatan Studi mencakup periode observasi, dengan mempertimbangkan variabel input seperti belanja daerah dan jumlah pegawai, serta variabel output seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan capaian indikator pembangunan. Metode analisis regresi panel digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel independen seperti PAD, Belanja Modal, TKDD, SiLPA terhadap tingkat efisiensi keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi *EViews*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. TKDD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. SiLPA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.. Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran dan berbasis kinerja.

Kata Kunci: Efisiensi, Kabupaten/Kota, Observasi, Kinerja Keuangan, Jawa Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi publik seperti pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan tujuan mereka. Ini juga dikenal dengan sebutan akuntabilitas. Ini adalah efek dari perubahan aparatur pemerintah. Contoh pergantian pemerintahan dalam mendukung pembangunan setiap daerah atau wilayah di Indonesia adalah otonomi daerah (Andirfa et al., 2016)

Pengimplementasian otonomi daerah ialah perwujudan dari prinsip desentralisasi yang diatur dalam kerangka hukum nasional, khususnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut dijadikan landasan hukum bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri menurut potensi, keperluan, dan hajat masyarakat. Pemerintah daerah berwenang dalam pengaturan serta pengelolaan pemerintahan di wilayahnya sendiri, baik dalam bidang administrasi, pembangunan, maupun pelayanan publik, dengan tetap mengacu pada regulasi dan standar nasional. Selain itu, kerangka otonomi daerah juga diperkuat oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah diamanahi keleluasan guna mendorong kemandirian fiskal, termasuk dalam menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) serta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan akuntabel. Tujuannya adalah menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh nyata penerapan otonomi daerah dapat dilihat di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia, Jawa Tengah telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya menurut prinsip kemandirian dan penuh pertanggungjawaban. Pemerintah provinsi

menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah melalui visi serta misi yang termuat dalam program strategis yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Namun demikian, untuk menilai efektivitas implementasi otonomi daerah, diperlukan evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan visi dan program-program pembangunan tersebut. Evaluasi ini mencakup sejauh mana kebijakan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga, pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya soal pelimpahan kewenangan, tetapi juga menyangkut akuntabilitas dan kualitas kinerja pemerintahan daerah selama menjalankan tugas serta kewajiban yang menjadi pertanggungjawaban mereka.

Provinsi Jawa Tengah dijadikan sasaran penelitian yang menarik dikarenakan Provinsi Jawa Tengah terus membenahi mekanisme daerahnya. Hal ini dibuktikan melalui laporan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018-2022 dan nominal pembayaran PAD yang cenderung meningkat, dengan adanya peningkatan dari segi pembiayaan diharapkan digunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian juga, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menargetkan kinerja belanja, baik kabupaten maupun yang terkait dengan proyek dan kegiatan, untuk menetapkan tanggung jawab atas rencana belanja dan menjelaskan bagaimana anggaran digunakan secara efektif dan efisien, dan bagaimana anggaran hasil yang dicapai selama satu tahun dibandingkan dengan tahun mendatang.

APBD tahunan merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. APBD menjadi alat perencanaan dan pengendalian keuangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna merealisasikan program-program pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan (Fathiyah, 2021). Alokasi tingkat penerimaan dan belanja daerah tercermin dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan hubungan proporsional yang lurus, yang berarti bahwa ketika alokasi pendapatan daerah meningkat,

bagian dana pembangunan dalam belanja daerah juga akan meningkat, memungkinkan pemenuhan tuntutan pembangunan yang mulus. Pertimbangan bahwa pengenalan desentralisasi pajak secara signifikan mengurangi sumber daya keuangan yang tersedia bagi pemerintah daerah dan memungkinkan penurunan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Dalam hal ini, ada permintaan yang lebih besar akan uang untuk pengeluaran daerah, yang harus dibelanjakan secara efektif, ekonomis, dan efisien. Dengan cara yang efektif belanja daerah adalah segala jenis belanja publik yang dikendalikan oleh kabupaten, kota, atau provinsi dan mencakup kegiatan wajib dan pilihan yang diamanatkan oleh undang-undang (Sasana, 2011).

Pengeluaran daerah yang tertuju sejalan dengan pengeluaran yang dibutuhkan masyarakat menekan munculnya pembangunan yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran daerah harus diarahkan oleh kebijakan fiskal guna pemenuhan hajat masyarakat di berbagai sektor, misal infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan, serta bidang lain yang mempengaruhi pembangunan daerah. Pengeluaran daerah harus direncanakan dengan teliti, berdasarkan data kebutuhan masyarakat, dan dievaluasi dengan cara yang transparan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah provinsi memiliki tugas yang berat dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola administrasi perpajakan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, kemudian diharapkan pelayanan publik dan kemaslahatan bersama dapat terwujud dan terpenuhi (Ara, 2016).

Belanja modal ialah satu dari beberapa instrumen krusial dalam struktur belanja daerah dimana memiliki peran strategis guna mendorong pembangunan dan pemberdayaan wilayah. Komponen ini mencakup belanja pemerintah daerah dalam rangka memperoleh aset dan infrastruktur yang memiliki kebermanfaatan berjangka panjang. Secara fungsional, belanja modal selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi instrumen vital dalam mewujudkan

pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan merata. Peningkatan kualitas infrastruktur yang didanai melalui belanja modal dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, mempercepat mobilitas barang dan jasa, serta menciptakan peluang ekonomi baru yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Perbedaan kapasitas keuangan antardaerah menjadikannya tantangan utama dalam terselenggaranya otonomi daerah di Indonesia. Potensi sumber daya dan kemampuan fiskal antar daerah tidak seragam, sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal yang signifikan antar wilayah. Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan layanan publik secara optimal. Dalam konteks ini, alokasi belanja modal yang tepat dan strategis menjadi sangat penting karena dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui penciptaan nilai ekonomi baru dan efek ganda (*multiplier effect*) yang berkelanjutan. Ketimpangan dalam kapasitas fiskal ini menjadi hambatan struktural dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan berkeadilan. Maka, pemerintah pusat dan daerah yang bersinergi dalam mengelola keuangan publik sangat diperlukan guna memastikan bahwa otonomi daerah tidak hanya menjadi konsep administratif, tetapi benar-benar mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, juga berkelanjutan.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan mekanisme penting terkait kerangka desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui TKDD, pemerintah pusat menyalurkan sebagian sumber daya keuangan negara ke pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah sebagai upaya pemerkuat kapasitas fiskal daerah baik untuk penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong akselerasi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia terkhusus wilayah Jawa Tengah yang menjadi objek penelitian. Kebijakan TKDD lahir sebagai

respons terhadap kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah yang telah berlangsung lama. Ketimpangan ini selain berdampak terhadap bidang ekonomi, juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah. TKDD menjamin kelayakan kepemilikan sumber daya keuangan pemerintah daerah dalam rangka perancangan dan penyelenggaraan program pembangunan yang sejalan dengan karakteristik, potensi, dan keperluan lokal masing-masing. Selain itu, dana yang dialokasikan, khususnya Dana Desa, memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk mengoptimalkan pengembangan potensi perekonomian daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya secara langsung.

TKDD mencakup beberapa instrumen dasar, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Masing-masing komponen dirancang dengan fungsi dan tujuan spesifik dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan nasional. DAU menjadi instrumen utama dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan serta layanan publik minimum bagi daerah dengan keterbatasan fiskal. Sementara itu, DAK dialokasikan secara spesifik dalam pembiayaan kegiatan yang menjadi prioritas nasional namun pelaksanaannya berada di tingkat daerah. DAK diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang meliputi sektor-sektor vital seperti jalan dan irigasi, fasilitas kesehatan (baik layanan dasar maupun rujukan), pendidikan, serta infrastruktur pemerintahan lainnya. Penyaluran DAK bersifat terikat, di mana penggunaannya harus mengikuti ketentuan teknis sesuai ketetapan pemerintah pusat. DBH, pada sisi lain, merupakan bentuk pembagian pendapatan negara dari kekayaan alam dan pajak tertentu antara pemerintah pusat dan daerah. DBH dimaksudkan untuk memperbaiki keseimbangan fiskal dengan mempertimbangkan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara. Dalam penetapannya, potensi ekonomi dan kapasitas produksi suatu daerah menjadi faktor penting yang memengaruhi

besaran alokasi DBH, sehingga daerah penghasil memiliki insentif untuk terus mengembangkan sektor unggulannya secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, alokasi TKDD dilakukan secara rutin setiap tahun dengan formula yang terus diperbarui oleh pemerintah pusat untuk menjaga keadilan fiskal, mendorong efektivitas pembangunan daerah, dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Melalui kombinasi dari ketiga komponen utama ini, TKDD diharapkan mampu mendukung penguatan sinergitas pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan keberlanjutan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) ialah instrumen penting pada struktur pembiayaan daerah yang berfungsi sebagai sumber dana tambahan untuk mendukung belanja modal. Dalam kerangka hukum yang ditegaskan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014, SiLPA dengan eksplisit disebutkan sebagai satu dari beberapa bentuk pemanfaatan pembiayaan oleh pemerintah daerah, di samping dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pinjaman daerah. SiLPA ialah wujud akibat dari efisiensi realisasi anggaran, sisa dana dari kegiatan yang belum terserap, atau penerimaan daerah yang melampaui target. Penggunaan SiLPA secara bijak memungkinkan kesinambungan program prioritas tanpa harus menunggu alokasi anggaran baru, serta dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pinjaman atau transfer pusat. Dengan demikian, perencanaan dan pemanfaatan SiLPA perlu diarahkan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, serta mendukung program pembangunan yang berdampak langsung pada perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengevaluasi sejauh mana APBD digunakan menurut asas efektif, efisien, serta ekonomis atau dikenal sebagai pendekatan *value for money* pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota dan kabupaten, perlu melakukan analisis mendalam terhadap struktur dan realisasi belanja daerah (Kainde, 2013). Pendekatan yang mendukung proses evaluasi ini misalnya Analisis Standar Belanja (ASB), yang berfungsi sebagai tolak

ukur untuk menilai kewajaran dan rasionalitas pengeluaran terhadap kegiatan atau proyek yang dilaksanakan oleh setiap unit organisasi dalam satu periode anggaran (Adisasmita, 2011). Para peneliti telah melakukan analisis pengeluaran daerah, tetapi temuan penelitian ini terus menyimpang.

Jika penelitian sebelumnya yang dikembangkan oleh Mualina & Alkama (2021) lebih fokus terkait dengan aspek teknis penyaluran dan pengelolaan APBD pada tingkat kabupaten dan kota, seperti mekanisme pencairan dana, prosedur perencanaan, dan pengawasan, maka penelitian terbaru cenderung lebih tertarik pada dampak langsung alokasi anggaran terhadap kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya itu, pada penelitian tersebut juga menjelaskan mengenai menggali lebih dalam mengenai efisiensi dalam pengelolaan anggaran, termasuk bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk program yang sesuai dengan manfaat bagi masyarakat dan juga memberikan informasi mengenai alokasi dana serta upaya untuk meminimalkan penyalahgunaan dana.

Dengan kata lain, fokus penelitian saat ini tidak lagi terbatas pada evaluasi terhadap proses pelaksanaan semata, melainkan telah berkembang untuk mencakup penilaian terhadap hasil akhir serta dampak yang ditimbulkannya. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, serta sebagai wawasan mendalam mengenai efisiensi penggunaan anggaran dalam mendorong kemajuan daerah.

Penelitian sekarang lebih memperhatikan bagaimana dana dialokasikan untuk program-program yang prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penelitian juga mengeksplorasi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan pengelolaan dana dan penyalahgunaan wewenang.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang yang sudah dikemukakan, dirumuskan masalah pokok penelitian, yakni :

1. Bagaimana kontribusi PAD terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana dampak TKDD terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Sejauh mana Anggaran Belanja Modal memengaruhi efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Seberapa besar dampak SiLPA terhadap efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh belanja modal, dana perimbangan, serta PAD Provinsi Jawa Tengah sebagai variabel independen utama. Selain itu, variabel lain yang berpotensi memengaruhi juga akan dipertimbangkan sebagai variabel kontrol dalam analisis.
2. Fokus cakupan penelitian ini yakni pada analisis kontribusi belanja modal pada kondisi keuangan daerah, pemahaman mengenai pengelolaan finansial, serta peran PAD dalam memengaruhi kinerja keuangan daerah selama periode 2018–2022. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa analisis dilakukan berdasarkan data yang relevan dan terukur.
3. Pembatasan masalah ini akan mencakup permasalahan dalam penelitian ini mencakup pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi yang digunakan dalam SAKD, serta mencakup prosedur-prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan proses pelaporan keuangan yang relevan.

4. Berbagai faktor lain yang berpotensi menyebabkan perubahan pada kinerja, seperti kebijakan pemerintah serta kondisi sosial-ekonomi di masing-masing daerah juga turut dipertimbangkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Kebermanfaatan yang diharapkan dari penelitian ini yakni :

1. Bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Diharapkan temuan ini akan membantu meningkatkan kinerja keuangan di masa depan.
2. Bagi Universitas
Hasil ini diharapkan dijadikan informasi tambahan terkait PAD, belanja modal, dana perimbangan, dan SiLPA.
3. Bagi Penulis
Dalam proses penelitian, penulis akan memahami dengan lebih mendalam tentang PAD, belanja modal, dana perimbangan, dan sisa perhitungan anggaran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling menjelaskan mengenai kemunculan konflik kepentingan diantara pemilik (*principal*) dengan pengelola (*agent*) sektor privat, terutama pada konteks perusahaan. Adaptasi teori Jensen dan Meckling ke sektor publik menunjukkan bahwa prinsip hubungan keagenan tetap relevan. Dalam tataran pemerintahan, masyarakat berperan sebagai prinsipal pemberi mandat kepada pemerintah sebagai agen pengelola sumber daya publik dengan efisien dan bertanggung jawab. Untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan dan ketidaksesuaian tujuan antara kedua pihak, diperlukan pengimplementasian prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berupa transparansi anggaran, partisipasi aktif masyarakat dalam *voting* sektor publik, serta sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, hubungan keagenan juga tercermin antara pemerintah pusat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat memiliki fungsi strategis sebagai pengarah kebijakan, pengawas implementasi, serta menjadi pengawas terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Pusat juga memberikan umpan balik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan daerah. Kinerja keuangan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan PAD, menjadi unsur mendasar dalam menilai kapasitas otonomi fiskal suatu daerah. Ketika pemerintah daerah mampu mengelola PAD secara optimal, hal ini mencerminkan kekuatan fiskal yang semakin mandiri. Peningkatan kemampuan ini tidak hanya meminimalisasi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, tetapi juga menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan. (Niswani et al., 2022).

Dengan meningkatnya kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi PAD mengindikasikan bertambahnya kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai berbagai sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, serta penyediaan layanan kesehatan yang memadai, tanpa harus terus-menerus bergantung pada dana dari APBN. Kemandirian fiskal ini mencerminkan kemajuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya efisien, tetapi juga akuntabel. Dengan kata lain, keberhasilan ini merupakan cerminan nyata dari penerapan prinsip-prinsip dalam teori keagenan, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas selama proses mengelola sumber daya publik dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.2 Pengelolaan Penerimaan Pendapatan

Dalam konteks manajemen organisasi sektor publik, terdapat tiga pilar utama yang menjadi dasar filosofi pengelolaan kinerja, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Di antara ketiganya, efisiensi memegang peranan penting karena menyangkut kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya guna mewujudkan *output* yang diharapkan. Efisiensi secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai *output* tertentu dengan penggunaan *input* seminimal mungkin, atau sebaliknya, mencapai *output* maksimal melalui pemanfaatan jumlah *input* yang tetap. Efisiensi menunjukkan keterkaitan antara penggunaan *input* dan *output* yang dihasilkan. Tingginya proporsi *output* terhadap *input* mengindikasikan makin efisiennya kinerja suatu organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, terutama di tingkat kabupaten dan kota, evaluasi terhadap efisiensi kinerja dilakukan melalui analisis rasio efisiensi (Mardiasmo, 2009). Rumus efisiensi tersebut melibatkan proporsi *output* yang dihasilkan dengan penggunaan *input* pada pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan publik. *Input* di sini merujuk pada sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu yang digunakan dalam operasionalisasi program. Sementara itu, *output*

mencakup hasil nyata dari pelaksanaan kebijakan, baik yang bersifat fisik (seperti jumlah infrastruktur yang dibangun) maupun finansial (nilai ekonomi dari hasil yang dicapai) (Madiasmo, 2009). Efisiensi dapat pula diartikan sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan aktivitas organisasi atas pencapaian sasaran tujuan, visi, dan misi. Oleh karena itu, distribusi biaya dalam pelaksanaan suatu kegiatan diubah menjadi indikator kinerja, sehingga evaluasi efisiensi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam menilai akuntabilitas dan profesionalisme tata kelola keuangan sektor publik (Bastian, 2006).

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, PAD merujuk pada semua perolehan pendapatan pemerintah daerah dari seluruh sumber di lingkup wilayah hukumnya. Pendapatan ini dihitung serta dihimpun menurut ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah, peraturan perundang-undangan nasional, serta secara jelas diatur dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Pendapatan ini dihimpun melalui beberapa komponen utama, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karenanya, besarnya kontribusi PAD pada total pendapatan daerah mengindikasikan tingginya tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Hal tersebut perlu diperhatikan karena menunjukkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan dengan tidak bergantung secara berlebihan dari transfer dana dari pemerintah pusat (Putri & Yuniarta, 2023).

2.1.4 TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa)

Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui skema transfer fiskal, yang dikenal sebagai transfer belanja ke daerah. Mekanisme ini dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta mempercepat proses pemerataan dan

pemberdayaan daerah dalam kerangka otonomi yang berkelanjutan. Tujuan utama dari belanja transfer ini adalah menciptakan keadilan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan bahwa seluruh daerah memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya pembangunan, terlepas dari tingkat kemajuan ekonomi atau geografisnya. Dalam konteks ini, belanja transfer berpotensi menjadi instrumen fiskal yang sangat penting untuk memperbaiki ketimpangan struktural, khususnya dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Evaluasi terhadap dampak transfer ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk bertambahnya angka IPM, berkembangnya ekonomi lokal, berkurangnya penduduk miskin, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat secara umum (Akhadi, 2023).

2.1.5 Belanja Modal

Belanja modal ialah komponen penting pada struktur pengeluaran pemerintah daerah dikarenakan dampaknya yang berkelanjutan terhadap pertumbuhan aset serta kapasitas pelayanan publik. Pengeluaran ini ditujukan untuk memperoleh, membangun, atau meningkatkan aset tetap dengan kebermanfaatan ekonomi dan operasional melebihi satu tahun anggaran (Mardiasmo, 2009). Perolehan aset dari belanja modal biasanya memiliki karakteristik tertentu: bersifat berwujud (seperti gedung, jalan, kendaraan dinas, dan peralatan), memiliki nilai material yang signifikan, serta memberikan manfaat dalam periode yang berkelanjutan. Namun, pada praktiknya, belanja modal juga mencakup pembiayaan untuk pemeliharaan dan perawatan aset yang telah ada, terutama jika upaya tersebut bertujuan memperpanjang masa manfaat dan meningkatkan kualitas atau kapasitas dari aset tersebut. Dengan demikian, belanja modal tidak hanya sekadar menambah aset baru, tetapi juga mendukung keberlanjutan fungsi pelayanan publik melalui pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Ciri aset lainnya antara lain tidak berwujud, berkontribusi pada aset pemerintah, periode kebermanfaatannya tidak hanya satu tahun, serta mempunyai nilai material yang sebanding. Perbedaan antara

anggaran belanja modal dan aktualisasinya dikenal sebagai variasi belanja modal. Kepala daerah cenderung mengusulkan anggaran belanja modal yang melebihi kebutuhan aktual (*over-budgeting*). Motif di balik preferensi ini bisa beragam, mulai dari antisipasi terhadap fluktuasi harga hingga untuk menunjukkan ambisi pembangunan yang tinggi secara politis. Akibatnya, belanja modal yang tidak terealisasi secara optimal dapat menimbulkan ketidakefisienan anggaran dan melemahkan kredibilitas perencanaan fiskal pemerintah daerah (Abdullah & Halim, 2012).

2.1.6 SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)

Realisasi SiLPA ialah selisih positif antara realisasi pendapatan serta penerimaan pembiayaan dengan realisasi belanja serta pengeluaran biaya dalam suatu tahun anggaran, sebagaimana tercermin dalam APBD. SiLPA termasuk komponen penting untuk mengevaluasi efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah. SiLPA dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, penggunaan SiLPA dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama. Pertama, sebagai dana luncheon dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan program yang tidak terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya. Kedua, untuk pembiayaan rencana kegiatan yang awalnya tidak tercantum dalam APBD murni, namun dianggap strategis dan mendesak. Maka, pemanfaatan SiLPA perlu dilakukan dengan bijak serta terencana supaya mampu memberikan nilai tambah dalam pembangunan daerah serta mendorong tercapainya tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sholikhah, Priyono (2022).	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Komponen PAD pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.	Variabel Independen : Kontribusi (<i>Contribution</i>), Efektifitas (<i>Effectiveness</i>) Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Analisis efektivitas membuktikan bahwasanya capaian realisasi anggaran telah mencapai target yang sudah ditetapkan. Ini mengindikasikan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang dirancang. Sementara itu, analisis kontribusi mengungkapkan bahwa persentase kontribusi terhadap total pendapatan atau belanja masih berada di bawah ambang batas ideal, yakni kurang dari 20%. Dengan rasio kontribusi yang relatif rendah ini, indikator tersebut dinilai dalam kategori “kurang”.
2.	Farida, Nugraha (2019).	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	Variabel Independen : Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan Variabel Dependen : Laporan Kinerja Keuangan Kabupaten Subang.	Melalui perbandingan antara belanja modal dan belanja operasional, dibuktikan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Subang menunjukkan kecenderungan untuk lebih memfokuskan alokasinya pada belanja operasional. Meskipun demikian, dari sisi efektivitas PAD, kinerja pemerintah daerah dapat dikategorikan cukup positif. Dibuktikan dari capaian rasio efektivitas PAD yang secara konsisten melampaui angka 100% selama beberapa tahun terakhir, yakni masing-masing sebesar 127,2%, 111,6%, 110,6%, serta 105,8%.
3.	Sholikhah, Priyono (2022).	Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah	Variabel Independen : APBD, Belanja Modal	Hasil analisis membuktikan bahwasanya selama tahun 2017-2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Daerah Kabupaten Jepara.	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Daerah.	mencatat rata-rata varians belanja sebesar 92,9%. Varians ini dikategorikan sebagai Selisih Disukai (Favourable Variance) karena realisasi belanja berada di bawah jumlah alokasasi penganggaran. Capaian ini mengindikasikan bahwasanya pemerintah daerah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran secara lebih hemat dan terkendali, meskipun tingkat efisiensi tersebut tidak terlalu tinggi dalam hal persentase.
4.	Armaja, Ibrahim dan Aliamin (2015).	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh).	Variabel Independen : Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah Variabel Dependen : Kinerja Keuangan.	Ditemukan hubungan positif yang lemah antara variabel kekayaan daerah, dana perimbangan, serta belanja daerah atas kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan pada variabel-variabel tersebut dapat memberikan dorongan terhadap perbaikan kinerja keuangan, meski tidak secara signifikan.
5.	Antari, Sedana (2018).	Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Variabel Independen : PAD, Belanja Modal Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	PAD berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Besarnya kemampuan daerah dalam menggali potensi PAD mengindikasikan baiknya kinerja keuangan yang ditunjukkan, karena daerah menjadi lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, belanja modal justru menunjukkan dampak negatif, kemungkinan

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				ialah akibat dari tidak optimalnya pengelolaan serta realisasi belanja modal.
6.	Ratnasari, Meirini (2022).	PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur.	Variabel Independen : PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SiLPA Variabel Dependen : Kinerja Keuangan.	Kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur menunjukkan dinamika yang menarik kaitannya dengan berbagai variabel fiskal. PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, dana perimbangan SiLPA justru memberikan dampak negatif yang signifikan dan belanja modal berpengaruh positif signifikan.
7.	Putri, Yuniarta (2023).	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.	Variabel Independen : PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Variabel Dependen : Kinerja Keuangan.	Dalam periode 2017 hingga 2021, PAD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sebaliknya, dana perimbangan dan belanja modal menunjukkan pengaruh negatif meskipun tidak signifikan.
8.	Sari, Halmawati (2021).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.	Variabel Independen : PAD, DAU dan Belanja Daerah Variabel Dependen : Kinerja Keuangan.	PAD, DAU, serta belanja daerah terbukti berpengaruh signifikan dan berkontribusi nyata terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan

Perkembangan teori agensi dalam menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mencerminkan dinamika hubungan hierarkis yang dilandasi oleh perbedaan informasi dan kepentingan. Dalam kerangka ini, pemerintah pusat berperan sebagai principal yang menetapkan tujuan pembangunan nasional dan menyerahkan sebagian wewenang fiskal kepada pemerintah daerah sebagai agent untuk mewujudkan tujuan tersebut. Di sisi lain, pemerintah daerah umumnya mempunyai akses mendalam atas informasi lokal, termasuk kapasitas PAD serta strategi optimal dalam pemanfaatannya.

Dengan eksplorasi dan pemanfaatan yang tepat, potensi kawasan ini dapat meningkatkan pendapatan awalnya, yang akan meningkatkan pendapatan keseluruhannya. Mengurangi ketergantungan pada dana bantuan pemerintah pusat dimungkinkan oleh pendapatan daerah, yang membantu pertumbuhan pendapatan daerah. Dikelolanya keuangan daerah dengan efisien menunjukkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola potensi dan sumber daya mereka melalui pajak dan retribusi, yang menghasilkan peningkatan output.

Pernyataan yang ditemukan dalam penelitian (Kasdy et al., 2019) varian PAD yang berdampak negatif pada varian efisiensi dapat dilihat sebagai tanda bahwa pendanaan tidak mencukupi untuk mencapai PAD pada tingkat efisiensi secara keseluruhan. Kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan PAD untuk mendanai posisi lain, termasuk pengeluaran staf yang lebih kritis (yaitu, pengeluaran karyawan yang tidak dapat ditunda), adalah aspek lain yang menunjukkan bahwa varian PAD memiliki dampak yang merugikan. Sama dengan hasil apa yang dikemukakan oleh peneliti lainnya yang menyatakan bahwasanya hasil penelitian ini membuktikan bahwasanya PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Penemuan ini

bertentangan dengan teori agensi dan bertolak belakang dengan penelitian (Ratnasari & Meirini, 2023), (Putri & Yuniarta, 2023) yang menyimpulkan adanya pengaruh negatif dan signifikan dari PAD.

Pengembangan penelitian akan membantu pemerintah daerah membuat keputusan tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses perhitungan dan pelaporan pajak, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, melakukan audit secara berkala terhadap pengelolaan PAD, dan memberikan sanksi yang tegas untuk pelanggaran yang terlibat dalam penyimpangan, melakukan kajian mendalam terhadap potensi sumber PAD baru yang belum tergarap secara maksimal, seperti pajak daerah atas potensi wisata, pajak reklame, atau retribusi pelayanan tertentu.

H1 : PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh TKDD terhadap kinerja keuangan

Sesuai dengan teori keagenan (Putri et al., 2022), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama untuk memenuhi kewajiban dan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat sekaligus pemerintah pusat sebagai prinsipal. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien tidak hanya menjadi indikator keberhasilan administrasi daerah, tetapi juga mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, tata kelola keuangan yang baik mampu membangun dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah

TKDD merupakan penyaluran alokasi keuangan oleh pemerintah pusat dari APBN pada pemerintah daerah sebagai dukungan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022. Besarnya Transfer Daerah dan Dana Desa yang diterima daerah umumnya berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja keuangan daerah tersebut. Hal ini karena rasio efisiensi yang lebih rendah

sebenarnya mencerminkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif dan produktif, sehingga menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik serta berkelanjutan. Maka, pemahaman mendalam terhadap rasio efisiensi sangat penting dalam menilai kualitas pengelolaan dana perimbangan di tingkat daerah (Sitepu & Lestari, 2017).

Besarnya penerimaan pemerintah daerah akan jumlah dana transfer mengindikasikan tingginya tingkat dependensi mereka terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk bertanggung jawab secara penuh kepada pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Kajian oleh Nugroho (Nugroho, 2012), (Putri et al., 2022), (Andirfa et al., 2016) mengungkapkan bahwasanya dana perimbangan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun dana transfer dari pusat memiliki potensi besar, pemanfaatannya belum optimal dan justru menimbulkan ketergantungan yang berlebihan.

Melalui penerapan analisis kelayakan yang komprehensif terhadap setiap proyek investasi, harapannya penelitian ini berpotensi menjadi pijakan yang kuat bagi pemerintah daerah terkait perumusan kebijakan strategis dalam rangka optimalisasi kinerja keuangan daerah. Di samping itu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi proyek-proyek prioritas yang memberikan kontribusi paling besar terhadap perbaikan kinerja fiskal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

H2 : TKDD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan

Dalam konteks teori keagenan, pemerintah daerah berperan sebagai prinsipal dan bertugas mengelola kepentingan masyarakat.

Mengalokasikan belanja modal untuk mendukung berbagai inisiatif regional, seperti memperoleh sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan standar layanan publik, adalah salah satu cara untuk memenuhi kewajiban ini (Putri & Yuniarta, 2023). Banyaknya belanja modal yang dialokasikan menunjukkan betapa berdedikasinya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan dalam rangka meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi diantisipasi sebagai akibat dari pengeluaran pemerintah untuk tujuan ini. Menurut teori keagenan, belanja modal yang lebih tinggi akan mendorong pertumbuhan yang lebih luas dan meningkatkan total pendapatan masyarakat selain menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat. (Ratnasari & Meirini, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari & Meirini, 2022) mengungkapkan bahwasanya belanja modal berpengaruh signifikan atas kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana mengindikasikan bahwasanya investasi pada aset tetap dapat menjadi pendorong utama peningkatan kinerja. Hasil serupa juga ditemukan oleh yang juga menegaskan bahwasanya belanja modal mempunyai peranan penting dalam memperkuat struktur keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Namun, penelitian oleh (Mufti et al., 2024) menemukan bahwasanya meskipun terdapat pengaruh, belanja modal justru memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan, meski dalam tingkat yang relatif kecil.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam penyusunan serta pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang terperinci, realistis, serta selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Dalam proses penyusunan RKA, penting untuk mempertimbangkan secara cermat ketersediaan dana transfer serta alokasi dana desa, agar perencanaan anggaran mencerminkan kapasitas fiskal yang sebenarnya. Selain itu, pemerintah juga perlu menetapkan program-program prioritas berdampak

signifikan terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Salah satu pendekatan kebijakan yang dapat diterapkan adalah pemberian insentif kepada desa-desa yang menunjukkan peningkatan kinerja dalam pengelolaan dana desa.

H3 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2.4 Pengaruh SiLPA terhadap kinerja keuangan

Teori agensi menjelaskan dinamika hubungan antara pihak agen yakni pemerintah daerah serta pihak prinsipal, yaitu masyarakat atau pemerintah pusat. Hubungan ini terbentuk ketika prinsipal memberikan mandat atau kewenangan kepada agen untuk menjalankan tugas tertentu guna mencapai tujuan bersama, seperti pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Agen, yang seharusnya bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal, tidak jarang memiliki agenda tersendiri, seperti mempertahankan kekuasaan politik, memperbesar anggaran untuk proyek-proyek yang menguntungkan secara politis, atau menunda realisasi anggaran demi kepentingan strategis lainnya. Dalam konteks Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), konflik semacam ini menjadi semakin nyata. Masyarakat sebagai prinsipal berharap SiLPA digunakan secara bijak dan efektif sebagai pendanaan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan publik.

SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. SiLPA berpotensi menjadi indikator penting untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Temuan ini mendukung teori dan penelitian sebelumnya oleh (Ratnasari & Meirini, 2022), yang juga menunjukkan bahwa SiLPA dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian ini dan

studi-studi sebelumnya menghasilkan kesimpulan yang serupa mengenai dampak SiLPA terhadap kinerja keuangan.

Nilai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang rendah dalam laporan keuangan daerah mencerminkan efisiensi tinggi dalam proses pembiayaan dan pelaksanaan anggaran. Artinya, anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai program strategis, menutup kemungkinan terjadinya defisit, dan memastikan bahwa tidak ada dana publik yang terbuang sia-sia (Ratnasari & Meirini, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang ada untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Efektivitas pengelolaan anggaran yang tercermin dari rendahnya SiLPA menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana belanja publik benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

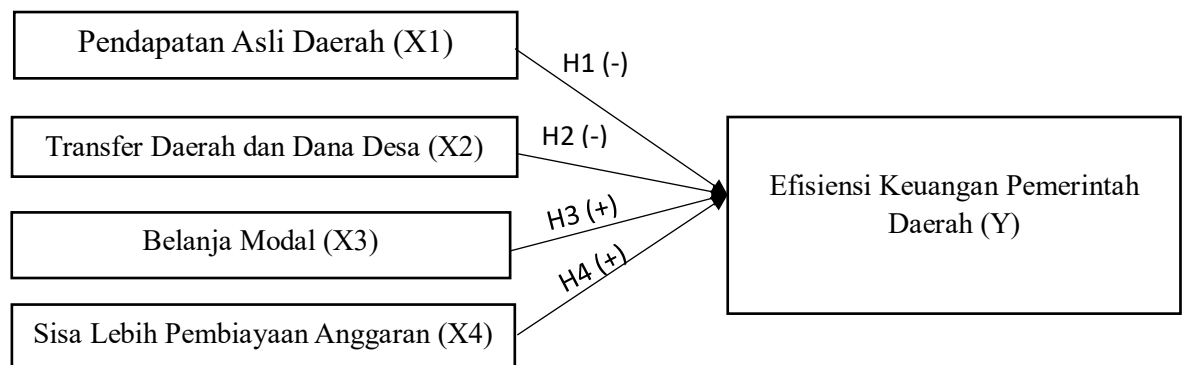
Bentuk upaya krusial yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan SiLPA ialah melalui analisis yang mendalam atas faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA pada tahun anggaran sebelumnya. Melalui evaluasi menyeluruh ini, pemerintah dapat mengidentifikasi akar permasalahan seperti keterlambatan pelaksanaan program, ketidaktepatan perencanaan anggaran, atau kendala administratif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan perbaikan pada proses perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya. Selain itu, pemerintah juga perlu mengalokasikan dana SiLPA secara strategis untuk membiayai program-program prioritas yang belum tercakup dalam APBD murni, terutama program yang berdampak langsung pada perbaikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

H4 : SiLPA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2.5 Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual penelitian berjudul "Pengaruh PAD, Transfer Daerah dan Dana Desa, Belanja Modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran" digunakan untuk membangun hipotesis. Kerangka konseptual diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang dimanfaatkan ialah seluruh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, meliputi 29 kabupaten dan 6 kota. Studi ini mencakup periode observasi lima tahun, yaitu tahun 2018-2022. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu merepresentasikan kondisi nyata serta mampu mengilustrasikan dengan seakurat mungkin terkait hubungan antara PAD, TKDD, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam rentang waktu ini, penelitian berupaya menganalisis sejauh mana variabel-variabel tersebut berkontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal serta perbaikan layanan publik tingkat daerah yang berkualitas.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan metode studi dokumentasi sebagai teknik utama untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Data yang dikumpulkan mencakup komponen keuangan daerah berupa PAD, TKDD, Belanja Modal, dan SiLPA. Seluruh data diperoleh dari sumber resmi dan terpercaya, yaitu situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data ini dihimpun untuk mengevaluasi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2018 hingga 2022. Dengan Melakukan analisis ini, peneliti berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efisiensi fiskal pemerintah daerah, termasuk dalam hal optimalisasi pendapatan, efektivitas belanja, serta kemampuan pengelolaan sisa anggaran.

3.3 Pengukuran Variabel Penelitian

Tabel 3. 1 Tabel Variabel Penelitian

Variabel	Pengukuran	Referensi
Variabel Terikat (Y)		
Efisiensi	$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	(Thalib, 2019)

Variabel	Pengukuran	Referensi
Variabel Bebas (X)		
PAD (X1)	$PAD = HPD + RD + PLPB + LPS$	(Mulyani & Wibowo, 2017)
TKDD (X2)	$TKDD = DBH + DAU + DAK + DID^*$	(Mulyani & Wibowo, 2017)
Belanja Modal (X3)	Belanja Modal = Belanja Tanah + Perlatan dan Mesin + Gedung dan Bangunan + Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Aset Tetap Lainnya + Konstruksi Dalam Pengerjaan + Aset Lainnya	(Mulyani & Wibowo, 2017)
SiLPA (X4)	$SiLPA = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Neto}$	(Elmiza & Arza, 2020)

*) DID = Dana Insentif Daerah

3.3.1 Variabel Dependen

3.3.2 Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah merupakan pendekatan penting sebagai evaluasi seberapa jauh suatu kegiatan ataupun proyek pemerintah daerah mampu memaksimalkan pencapaian hasil (*output*) dibandingkan pemanfaatan sumber dayanya (*input*). Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi apakah dana publik yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dalam konteks evaluasi kinerja keuangan daerah, efisiensi diukur melalui rasio (%) perbandingan realisasi belanja rutin terhadap total realisasi pendapatan daerah. Rendahnya rasio mengindikasikan efisiensi kinerja keuangan suatu daerah, atau menandakan bahwa pengeluaran biaya operasional lebih kecil dari perolehan pendapatan (Mardiasmo, 2002: 8). Rasio efisiensi ini diformulasikan menjadi :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian kinerja disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kinerja

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
>90% - 100%	Kurang Efisien
>80% - 90%	Cukup Efisien
≥60% - 80%	Efisien
Dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

3.4 Variabel Independen

Variabel independen ialah variabel yang memengaruhi atau faktor penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain yang disebut variabel dependen (terikat). Variabel ini berfungsi sebagai komponen utama yang memberikan kontribusi terhadap perubahan atau variasi pada variabel yang diteliti sebagai hasil atau akibat (Putri & Yuniarta, 2023). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengaruh PAD, pengaruh dana perimbangan, Pengaruh Belanja Modal, serta pengaruh SiLPA terhadap Kinerja Keuangan.

3.4.1 Pendapatan Asli Daerah

PAD ialah penerimaan yang sumbernya dari potensi ekonomi dan fiskal suatu daerah, dimana pemungutannya dilakukan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan dalam peraturan daerah. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan layanan publik dengan tidak bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. PAD mencakup Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPB), dan Pendapatan Lain-lain yang Sah (LPS).

Adapun rumusnya:

$$PAD = HPD + RD + PLPB + LPS.$$

3.4.2 Belanja Modal

Rasio Belanja Modal ialah indikator untuk menggambarkan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan keseluruhan total belanja daerah dalam satu periode anggaran. Rasio ini berfungsi sebagai alat analisis penting bagi para pengambil kebijakan, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi seberapa besar porsi anggaran daerah yang dialokasikan untuk kegiatan investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, atau pengembangan fasilitas publik.

Adapun rumusnya:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Perlatan dan Mesin + Gedung dan Bangunan + Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Aset Tetap Lainnya + Konstruksi Dalam Pengerjaan + Aset Lainnya.

3.4.3 Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD)

Indikator ukuran variabel TKDD ialah realisasi TKDD pada 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 2018 hingga 2022.

Adapun rumusnya:

$TKDD = DBH + DAU + DAK + DID.$

3.4.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengartikan SiLPA sebagai selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode pelaporan, yang timbul apabila realisasi pembiayaan melebihi defisit anggaran.

SiLPA dari tahun anggaran sebelumnya mencerminkan akumulasi sejumlah elemen penting, di antaranya: surplus penerimaan dari PAD, dana transfer pusat atau dana perimbangan, serta sumber pendapatan sah lainnya, kelebihan dari pembiayaan netto, efisiensi dalam pelaksanaan

belanja, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan hingga akhir tahun anggaran, serta sisa dana dari program yang belum selesai..

Adapun indikator pengukurannya yakni:

SiLPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Metode dan alat analisis data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dan menerapkan model analisis data panel guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penggunaan metode data panel dipilih karena menawarkan keunggulan dalam mengolah data yang memiliki dimensi waktu (*time series*) sekaligus mencakup beberapa entitas atau unit analisis (*cross-section*), seperti kabupaten/kota, secara bersamaan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi yang lebih komprehensif terhadap dinamika temporal serta karakteristik individual masing-masing unit terhadap variabel dependen. Proses pengolahan dan analisis data panel ini memanfaatkan perangkat lunak statistik *EViews*.

3.5.2 Analisis Regresi Data Panel

Data panel ialah kombinasi data deret waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) dalam suatu analisis. Data deret waktu mengacu pada himpunan data yang dikumpulkan dan penyusunannya didasarkan pada urutan waktu tertentu, seperti harian, bulanan, ataupun tahunan, sehingga mencerminkan perkembangan suatu variabel dari waktu ke waktu. Sementara itu, data silang ialah data dari beragam entitas, misalnya perusahaan, daerah, atau negara, pada satu titik waktu tertentu.

Keunggulan utama dari penggunaan data panel terletak pada kemampuannya menyatukan kekuatan kedua jenis data tersebut. Secara khusus, manfaat penggunaan data panel meliputi: Dengan menggabungkan dimensi waktu dan entitas, data panel menyediakan lebih banyak informasi dan variasi, yang pada akhirnya meningkatkan *degree of freedom* dalam

analisis serta memperkuat ketepatan estimasi model statistik, Mengatasi masalah penghilangan variabel (*omitted-variable bias*) untuk menangkap dinamika serta perbedaan karakteristik antar unit observasi yang tidak dapat diamati secara langsung. (Ghozali & Ratmono, 2013).

Analisis data panel memiliki cakupan aplikasi yang luas di berbagai bidang ilmu, khususnya dalam studi ekonomi dan bisnis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja sejumlah organisasi atau entitas dalam rentang waktu tertentu, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika perubahan dan pola hubungan antar variabel. Salah satu keunggulan utama metode ini adalah kemampuannya untuk mengatasi keterbatasan data, terutama ketika peneliti dihadapkan pada ukuran sampel yang relatif kecil.

3.5.3 Model Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis regresi data panel. Pengolahan data dilakukan melalui bantuan *software* statistik EViews. Dalam penerapannya, pendekatan utama untuk estimasi model data panel yakni: Model *Common Effect (Pooled Least Squares)*, Model *Fixed Effect*, Model *Random Effect*. Adapun modelnya memiliki formulasi berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it}.$$

.....

Keterangan:

Y = Realisasi (Kinerja keuangan)

α = konstanta atau *intercept*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

X1 = PAD

X2 = TKDD

X3 = Modal

$X_4 = \text{SILPA}$

$\varepsilon = \text{error}$, variabel pengganggu

$i = \text{periode waktu}$

$t = \text{individu/entitas}$.

3.5.4 Model Common Effect

Model *Common Effect* yang biasa dikenal dengan nama *Pooled Least Squares* ialah salah satu pendekatan yang menyatukan data deret waktu (*time series*) serta data lintas individu ataupun entitas (*cross section*) dalam satu model. Dalam pendekatan ini, tidak dilakukan penyesuaian terhadap efek individual (seperti perbedaan karakteristik antar daerah atau perusahaan), maupun efek temporal (seperti perubahan dari tahun ke tahun). Maka, estimasi dapat dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) karena dianggap tidak ada pengaruh heterogen yang perlu dikontrol secara khusus (Ghozali & Ratmono, 2013).

Bentuk persamaan model *common effect* yakni:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$Y_t = \text{variabel dependen}$; $X = \text{variabel independen}$

$i = \text{cross section}$; $t = \text{time series}$

3.5.5 Model Fixed Effect

Model Fixed Effect ialah pendekatan untuk mengatasi adanya perbedaan karakteristik unik antar individu atau entitas yang tidak dapat diamati secara langsung namun bersifat tetap (konstan) sepanjang periode waktu pengamatan. Model ini mengasumsikan bahwa *slope* atau koefisien regresi dari variabel independen bersifat konstan antar ruang (individu) dan waktu, namun perbedaan antar entitas tercermin pada nilai intersepnya. Estimasi *model fixed effect* diperoleh dengan

memperkenalkan variabel dummy bagi setiap entitas atau unit analisis, sehingga model ini juga dikenal sebagai *Least Squares Dummy Variable (LSDV)* (Ghozali & Ratmono, 2013).

Persamaan model *fixed effect* dengan teknik variabel dummy yaitu:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_4 D_{2i} + \dots + e_{it}$$

Keterangan :

$i = 1, 2, \dots, n$;

$t = 1, 2, \dots, t$;

$D = \text{dummy}$

3.5.6 Model Random Effect

Model *random effect* ialah model dengan asumsi bahwasanya koefisien *slope* tetap konstan, tetapi *intersep* berbeda antar individu dan antar waktu (*random effect*). Dalam model *fixed effect*, variabel *dummy* digunakan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya, yang menyebabkan berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan berujung membuat efisiensi parameter turun. Problem ini bisa diatasi melalui penggunaan variabel gangguan melalui metode *random effect*.

Model ini mendeteksi keterkaitan variabel gangguan antar waktu dan individu, sehingga dalam estimasi tepatnya mengaplikasikan *Generalized Least Square* (GLS) sebagai estimator sebagai peningkatan efisiensi serta *least square*. (Ghozali & Ratmono, 2013).

3.5.7 Uji Chow

Uji Chow atau F-test, ialah metode statistik dalam penentuan model regresi data panel yang paling tepat antara model *Common Effect* dan model *Fixed Effect*. Pengujian ini penting untuk memastikan apakah pendekatan yang mengasumsikan bahwa perilaku seluruh individu dalam populasi adalah seragam (*common effect*) sudah memadai, atau justru

perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar individu yang ditangkap melalui variabel *dummy* dalam model *fixed effect*. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan dua model regresi: satu model tanpa variabel *dummy* (*common effect*) dan satu lagi dengan variabel *dummy* untuk setiap entitas (*fixed effect*). Perbandingan ini menggunakan nilai *Residual Sum of Squares* (*RSS*) dari kedua model untuk menghitung nilai statistik F. Dalam konteks pengujian hipotesis, uji Chow menguji H_0 dengan asumsi bahwasanya model *common effect* sudah cukup artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antar individu, sehingga *intersep* dan *slope* dapat dianggap sama. Sedangkan H_1 mengasumsikan bahwasanya model *fixed effect* lebih tepat digunakan karena meskipun *slope* tetap, terdapat perbedaan nilai *intersep* antar individu yang signifikan secara statistik.

Adapun uji F statistiknya yaitu:

$$F \text{ hitung} = \frac{(RSS1 - RSS2)/i - 1}{(RSS2)/(it - i - k)}$$

Keterangan:

$RSS1$ dan $RSS2$ = *RSS* dari model *common effect* tanpa variabel *dummy*;

i = jumlah individu;

t = jumlah periode waktu;

k = banyaknya parameter dalam model *fixed effect*

3.5.8 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan salah satu langkah krusial untuk memilih model estimasi yang paling tepat antara model *Fixed Effect* dan model *Random Effect* dan berfokus pada perbedaan mendasar antara kedua pendekatan tersebut. *Fixed Effect* memiliki kelemahan, yakni berkurangnya derajat kebebasan karena penambahan banyak variabel *dummy*, terutama jika jumlah unit observasi besar. Sebaliknya, model

Random Effect (RE) mengasumsikan bahwa variasi individu ditangkap melalui komponen *error* yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H_0 : model random effect

H_a : model fixed effect

Secara teknis, uji Hausman mengikuti distribusi Chi-Square (χ^2) dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebanyak k , yaitu jumlah variabel independen yang digunakan dalam model. Nilai statistik Hausman dihitung dengan membandingkan hasil estimasi dari model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai statistik Hausman melampaui nilai kritis *Chi-Square* dalam suatu tingkat signifikansi, maka H_0 yang menyatakan tidak ada korelasi antara variabel bebas dan galat ditolak. Dengan demikian, model *Fixed Effect* dianggap lebih sesuai karena dapat memberikan hasil estimasi yang konsisten.

3.6 Uji hipotesis

Terdapat beberapa tahapan penting dalam uji hipotesis yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan dan signifikansi model regresi yang digunakan. Pengujian tersebut mencakup uji koefisien determinasi (R^2) untuk pengukuran sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen dalam model. Selanjutnya, uji signifikansi simultan (uji F) untuk mengidentifikasi apakah seluruh variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Terakhir, uji signifikansi parsial (uji t) untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

3.6.1 Uji koefisien determinasi

Koefisien determinasi (R^2) ialah satu dari beberapa indikator utama dalam analisis regresi untuk mengevaluasi seberapa jauh variabel-variabel independen dalam merepresentasikan variasi pada variabel dependen.

Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Semakin nilai R^2 mendekati 0 mengindikasikan keterbatasan kapasitas model dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Berlaku sebaliknya. Maka, R^2 penting untuk mengevaluasi sebaik apa sebuah model regresi untuk digunakan sebagai alat analisis dan prediksi. Meskipun demikian, nilai R^2 yang tinggi tidak selalu menjamin bahwa model tersebut adalah yang terbaik, karena aspek lain seperti asumsi klasik regresi dan relevansi teoritis juga perlu diperhatikan untuk memastikan validitas dan reliabilitas model secara menyeluruh.

3.6.2 Uji T

Uji T ialah teknik statistik untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Terdapat dua pendekatan umum dalam menafsirkan hasil uji T. Pertama, dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikansi tertentu. Pendekatan kedua yakni dengan melihat nilai probabilitas (p -value) dari hasil uji. Rumus untuk menghitung hipotesis uji T yakni:

1. Apabila hipotesis positif $H_0 : \beta_1 = 0$ $H_0 : \beta_1 > 0$
2. Apabila hipotesis negatif $H_0 : \beta_1 = 0$ $H_0 : \beta_1 < 0$
3. Menentukan tingkat signifikansi (α) misalnya 5%, maka kriteria pengujianya yakni:
5. Jika $p\text{-value} \geq 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak. Berarti, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
6. Jika $p\text{-value} \leq 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Berarti, variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen..

3.6.3 Uji F

Uji F bertujuan untuk memastikan kelayakan model.

Langkah-langkah uji F diantaranya :

(1). $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

Artinya tiada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen.

(2). $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$

Artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

(3). Mengukur nilai F hitung dan signifikansi F.

(4). Menentukan derajat signifikansi (α) misalnya 5% maka kriteria pengujiannya yakni:

7. Jika nilai $\text{Sig-F} \geq 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak, artinya variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.
8. Jika $\text{Sig-F} \leq 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi data

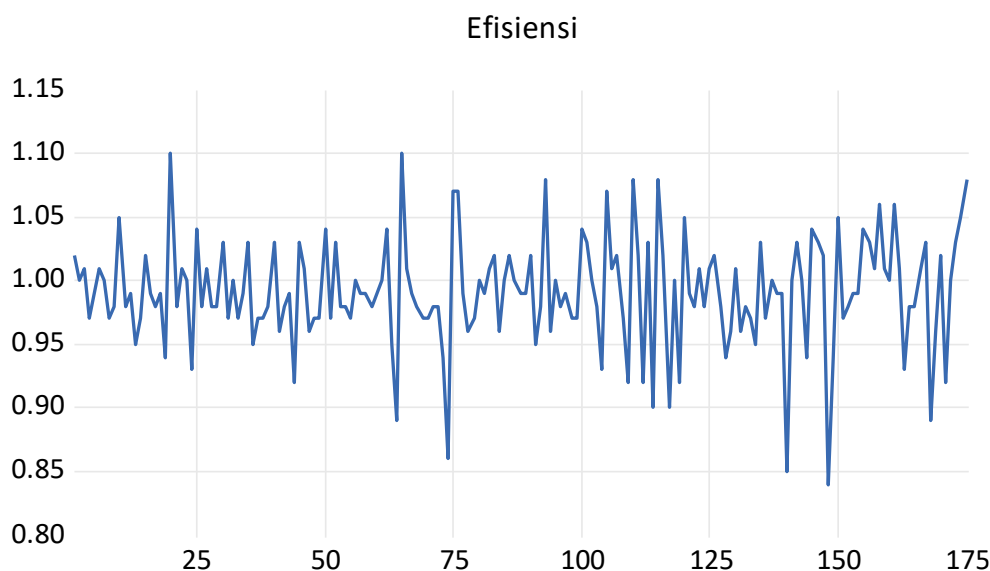
Penelitian ini dilangsungkan dalam rangka mengevaluasi tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder dari situs resmi DJPK. Data yang dianalisis bersumber dari postur APBD seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018 hingga 2022. Penelitian ini merupakan upaya dalam mengilustrasikan secara komprehensif terkait sejauh mana kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik dengan efisien.

4.2 Analisis Data

Analisis efisiensi pada penelitian ini merupakan suatu upaya sistematis untuk mengevaluasi seberapa optimal anggaran daerah digunakan dalam mencapai target yang telah direncanakan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi sejauh mana realisasi belanja publik mampu mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan fiskal di tingkat daerah. Selain itu, dengan menggunakan indikator dan kriteria penilaian kinerja yang telah distandarkan, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

4.3 Analisis Efisiensi

Gambar 4.1 Analisis Efisiensi



Analisis efisiensi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat mengelola anggaran daerahnya secara optimal selama periode 2018–2022. Efisiensi diukur dengan menggunakan rasio antara realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana yang tersedia untuk menghasilkan output sesuai rencana. Semakin mendekati 100%, semakin efisien penggunaan anggaran tersebut, dengan catatan tidak terjadi pengeluaran berlebihan atau pemborosan.

Berdasarkan data panel yang mencakup 35 kabupaten/kota (29 kabupaten dan 6 kota) selama 5 tahun, diperoleh total 175 observasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat efisiensi rata-rata seluruh kabupaten/kota berada dalam rentang 94%–98%. Nilai ini dapat dikategorikan sebagai efisiensi tinggi menurut kriteria Kementerian Dalam Negeri, yang menetapkan bahwa efisiensi di atas 90% menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif. Meskipun demikian, variasi antar daerah cukup signifikan, mencerminkan perbedaan dalam kapasitas fiskal, kemampuan manajerial, dan prioritas kebijakan daerah.

Tingkat efisiensi tertinggi ditemukan pada Kota Magelang pada tahun 2021, dengan capaian 99,2%. Hal ini disebabkan oleh pengendalian belanja yang ketat, terutama pada masa pandemi COVID-19, serta keberhasilan pemerintah kota dalam menyesuaikan program kerja dengan kondisi darurat kesehatan. Sebaliknya, efisiensi terendah tercatat di Kabupaten Brebes pada tahun 2020, sebesar 91,3%, yang disebabkan oleh penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat melemahnya aktivitas ekonomi, sementara belanja daerah tetap harus dipenuhi untuk mendukung penanganan pandemi.

Jika ditinjau dari tren tahunan, tingkat efisiensi relatif stabil pada periode 2018–2019, sedikit menurun pada 2020 akibat pandemi, kemudian kembali meningkat pada 2021–2022. Penurunan di tahun 2020 berkaitan dengan ketidakpastian fiskal yang tinggi, pergeseran anggaran untuk penanganan COVID-19, serta penundaan beberapa proyek infrastruktur. Pemulihan efisiensi di tahun 2021 dan 2022 disebabkan oleh membaiknya penerimaan daerah serta adaptasi pemerintah dalam melaksanakan program prioritas dengan sumber daya terbatas.

Analisis juga menunjukkan bahwa kota cenderung memiliki tingkat efisiensi sedikit lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Hal ini dapat disebabkan oleh skala wilayah yang lebih kecil, fokus pembangunan yang lebih terarah, dan penerimaan PAD per kapita yang relatif besar. Namun, beberapa kabupaten dengan basis ekonomi kuat seperti Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sukoharjo juga mencatat efisiensi tinggi secara konsisten, membuktikan bahwa efisiensi tidak semata-mata bergantung pada status administratif, tetapi juga pada strategi pengelolaan keuangan dan disiplin belanja.

Secara umum, perbedaan efisiensi antar daerah dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kapasitas fiskal, kualitas perencanaan dan penganggaran, serta manajemen kas daerah. Faktor eksternal meliputi dinamika ekonomi nasional, kebijakan transfer pemerintah pusat, dan kejadian luar biasa seperti pandemi. Dengan demikian, penguatan tata kelola keuangan daerah memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah telah mampu mempertahankan efisiensi pengelolaan anggaran pada tingkat yang baik, meskipun terdapat tantangan yang signifikan pada tahun-tahun tertentu. Ke depan, penting untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta mengoptimalkan PAD tanpa membebani masyarakat, agar efisiensi dapat dipertahankan bahkan dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Tabel Nama Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018-2022

Untuk mengetahui data secara akurat seberapa efisien anggaran yang terjadi di daerah Jawa Tengah, kita harus mengetahui nama dan juga pusat pemerintahannya. Selain itu, perlu juga diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Ini termasuk faktor internal, misalnya kualitas perencanaan dan kualitas aparatur, serta faktor eksternal, misalnya kondisi sosial juga geografis. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek dapat diperbaiki untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran.

Tabel 4.1 Nama Kota dan Pusat Pemerintahan pada Tahun 2018-2022

Nama Kabupaten	Tahun	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
KAB. BANJARNEGARA	2018	235.99	1,603.61	474.61	172.25	1.02
	2019	257.7	1,631.73	358.21	116.95	1
	2020	238.64	1,529.87	348.51	88.21	1.01
	2021	313.83	1,534.69	294.84	41.38	0.97
	2022	284.51	1,593.76	191.79	84.52	0.99
KAB. BANYUMAS	2018	648.33	2,224.54	525.42	382.44	1.01
	2019	686.81	2,345.92	478.8	290.35	1

Nama Kabupaten	Tahun	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
	2020	668.21	2,272.42	363.47	242.71	0.97
	2021	761.99	2,282.44	432.24	294.23	0.98
	2022	822.69	2,314.53	479.04	369.9	1.05
KAB.BATANG	2018	237.55	1,251.36	163.4	97.6	0.98
	2019	245.84	1,307.86	211.78	149.31	0.99
	2020	257.42	1,288.77	152.87	122.73	0.95
	2021	322.79	1,289.96	196.08	174.9	0.97
	2022	300.97	1,304.33	183.2	207.39	1.02
KAB.BLORA	2018	203.18	1,631.53	499.44	63.49	0.99
	2019	246.86	1,774.17	466.89	63.92	0.98
	2020	299.69	1,574.02	349.06	97.85	0.99
	2021	326.77	1,673.42	298.44	112.2	0.94
	2022	325.97	1,662.88	507.67	225.53	1.1
KAB. BOYOLALI	2018	342.96	1,655.03	498.97	153.55	0.98
	2019	395.43	1,702.78	530.59	146.26	1.01
	2020	451.51	1,680.23	405.11	103.94	1
	2021	514.97	1,651.98	443.85	133.81	0.93
	2022	444.69	1,711.07	567.08	282.66	1.04
KAB. BREBES	2018	346.91	1,753.06	527.16	164.75	0.98
	2019	379.09	2,317.11	621.92	212.06	1.01
	2020	392.54	2,200.76	432.56	166.14	0.98

Nama Kabupaten	Tahun	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
	2021	518.51	2,238.34	439.32	181.48	0.98
	2022	419.4	2,304.33	480.67	185.75	1.03
KAB. CILACAP	2018	527.58	2,142.30	550.84	221.47	0.97
	2019	574.28	2,261.99	663.32	302.16	1
	2020	591.34	2,421.41	462.43	280.87	0.97
	2021	739.13	2,137.59	583.82	324.58	0.99
	2022	700.43	2,286.28	537.11	314.07	1.03
KAB. DEMAK	2018	342.32	1,468.75	414.68	124.57	0.95
	2019	407.4	1,607.46	445.48	200.34	0.97
	2020	439.69	1,276.25	286.91	225.04	0.97
	2021	445.01	1,570.43	279.92	245.03	0.98
	2022	477.2	1,654.39	344.3	242.26	1.03
KAB. GROBOGAN	2018	315.74	1,794.02	423.43	135.12	0.96
	2019	344.56	1,890.10	448.67	165.06	0.98
	2020	350.45	1,811.35	338.71	134.76	0.99
	2021	424.19	1,846.53	290.18	103.18	0.92
	2022	424.75	1,927.93	462.23	236.13	1.03
KAB. JEPARA	2018	369.33	1,537.91	397.78	161.46	1.01
	2019	384.98	1,659.55	325.21	114.56	0.96
	2020	419.36	1,581.18	266.28	177.76	0.97
	2021	408.64	1,642.02	213.97	209.48	0.97

Nama Kabupaten	Tahun	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
	2022	427.52	1,679.39	196.3	269.19	1.04
KAB. KARANGANYAR	2018	343.16	1,532.82	261.94	186.96	0.97
	2019	387.76	1,549.99	286.88	221.49	1.03
	2020	384.68	1,497.21	148.56	197.45	0.98
	2021	426.65	1,477.19	193.82	177.76	0.98
	2022	511.74	1,541.98	253.01	175.43	0.97
KAB. KEBUMEN	2018	352.05	2,004.16	370	224.14	1
	2019	409.16	2,118.37	365.84	201.69	0.99
	2020	403.03	2,074.49	288.8	202.67	0.99
	2021	472.02	2,059.29	266.11	219.95	0.98
	2022	512.35	2,123.30	272.3	269.18	0.99
KAB. KENDAL	2018	335.89	1,541.89	284.99	234.87	1
	2019	350.5	1,625.26	283.5	212.48	1.04
	2020	356.75	1,521.60	108.46	97.69	0.95
	2021	439.2	1,581.66	141.15	182.03	0.89
	2022	437.9	1,634.23	338.36	415.8	1.1
KAB. KLATEN	2018	395.88	4,652.13	384.57	455.69	1.01
	2019	311.65	2,040.73	308.15	395.41	0.99
	2020	329.96	1,954.41	157.13	382.69	0.98
	2021	315.3	1,923.41	189.61	440.59	0.97

Nama Kabupaten	Tahun	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
	2022	358.05	1,982.24	247.41	493.72	0.97
KAB. KUDUS	2018	337.36	1,425.37	377.58	138.85	0.98
	2019	343.82	1,491.20	278.21	169.64	0.98
	2020	383.89	1,420.72	221.81	190.89	0.94
	2021	507.17	1,415.04	155.22	288.29	0.86
	2022	418.71	1,447.04	379.32	546.56	1.07
KAB. MAGELANG	2018	325.09	1,723.49	501.73	301.19	1.07
	2019	417.18	1,883.66	386.53	222.18	0.99
	2020	329.77	1,781.72	214.41	218.81	0.96
	2021	375.38	1,797.47	251.16	287.69	0.97
	2022	432.69	1,888.75	304	328.58	1
KAB. PATI	2018	384.04	2,045.27	439.49	283.44	0.99
	2019	364	2,091.30	405.1	252.59	1.01
	2020	371.71	1,970.80	315.61	200.86	1.02
	2021	388.64	1,989.61	271.12	100.99	0.96
	2022	388.75	2,041.71	240.76	202.91	1
KAB. PEKALONGAN	2018	311.29	1,523.73	431.41	229.86	1.02
	2019	341.34	1,616.28	345.17	170.56	1
	2020	341.9	1,511.24	241.24	159.98	0.99
	2021	346.6	1,504.03	208.05	163.76	0.99

Nama Kabupaten	Tahun	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
	2022	305.32	1,526.61	261.16	161.26	1.02
KAB. PEMALANG	2018	300.48	1,796.74	291.38	230.44	0.95
	2019	350.56	1,946.94	347.66	312.2	0.98
	2020	328.38	1,816.25	342.59	347.91	1.08
	2021	365.39	1,905.40	180.05	123.92	0.96
	2022	321.26	1,941.52	150.61	197.2	1
KAB. PURBALINGGA	2018	286.68	1,450.01	270.53	114.49	0.98
	2019	306	1,552.77	262.14	125.14	0.99
	2020	313.62	1,420.76	130.33	129.99	0.97
	2021	377.88	1,444.52	196.96	181.33	0.97
	2022	306.2	1,556.92	239.86	224.25	1.04
KAB. PURWOREJO	2018	286.97	1,581.45	365.87	175.78	1.03
	2019	280.4	1,694.81	327.41	107.11	1
	2020	304.8	1,652.29	254.02	88.03	0.98
	2021	438.26	1,654.20	266.46	148.17	0.93
	2022	330.27	1,704.40	419.62	284.27	1.07
KAB. REMBANG	2018	296.68	1,300.23	309.45	117.16	1.01
	2019	308.45	1,310.40	207.07	75.42	1.02
	2020	326.67	1,368.62	154.12	40.14	0.97
	2021	404.1	1,299.39	187.29	65.33	0.92

Nama Kabupaten	Tahun	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
	2022	353.09	1,348.74	280.27	133.34	1.08
KAB. SEMARANG	2018	383.48	1,403.30	405.05	234.92	1.02
	2019	429.01	1,577.35	393.47	181.11	0.92
	2020	442.53	1,481.59	219.07	175.63	1.03
	2021	575.75	1,494.81	292	188.71	0.9
	2022	480.3	1,610.96	368.03	405.91	1.08
KAB. SRAGEN	2018	334.3	1,551.66	428.22	176.85	1.02
	2019	368.33	1,657.51	249.33	277.93	0.9
	2020	394.46	1,567.93	268.51	376.28	1
	2021	537.27	1,522.77	211.77	342.65	0.92
	2022	364.48	1,607.32	351.88	515.91	1.05
KAB. SUKOHARJO	2018	433.49	1,981.64	388.47	467.28	0.99
	2019	458.74	1,291.90	350.58	310.18	0.98
	2020	469.54	1,215.85	238.74	420.46	1.01
	2021	528.35	1,345.61	283.87	358.45	0.98
	2022	495.28	1,317.91	220.46	361.68	1.01
KAB. TEGAL	2018	372.28	1,830.91	417.98	106.93	1.02
	2019	436	1,972.20	434.39	59.88	0.98
	2020	439.93	1,900.44	248.98	88.99	0.94
	2021	519	1,911.80	368.88	218.1	0.96
	2022	531.15	1,984.51	313.68	297.03	1.01

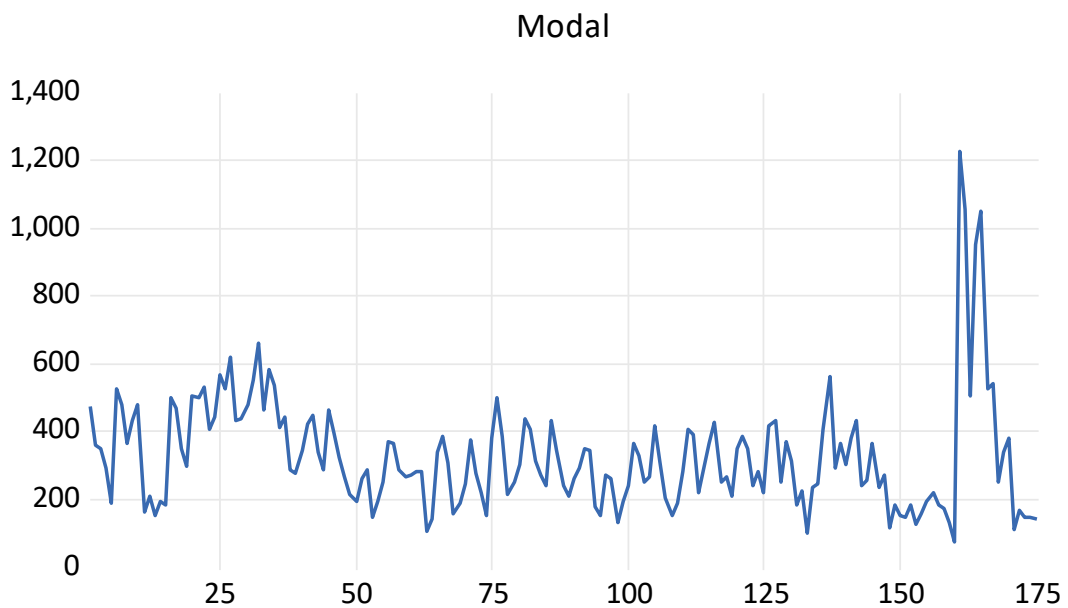
Nama Kabupaten	Tahun	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
KAB. TEMANGGUNG	2018	252.02	1,300.90	185.77	66.48	0.96
	2019	278.31	1,416.96	223.34	85.36	0.98
	2020	307.49	1,350.76	102.08	123.4	0.97
	2021	363.13	1,385.93	236	162.46	0.95
	2022	308.71	1,448.79	247.09	254.25	1.03
KAB. WONOGIRI	2018	269.03	1,741.08	406.9	196.66	0.97
	2019	287.22	1,869.42	565.09	241.27	1
	2020	274.29	1,714.80	291.31	226.96	0.99
	2021	241.3	1,755.31	364.81	235.33	0.99
	2022	332.81	1,759.21	301.74	237.88	0.85
KAB. WONOSOBO	2018	226.82	1,332.97	381.6	180.99	1
	2019	283.37	1,482.50	430.77	255.34	1.03
	2020	251.72	1,385.41	243	148.14	1
	2021	339.75	1,379.63	256.22	154.76	0.94
	2022	264.94	1,400.28	363.44	252.1	1.04
KOTA MAGELANG	2018	249.88	588.71	237.42	180.99	1.03
	2019	273.58	616.5	272.06	134.41	1.02
	2020	290.76	583	116.56	107.05	0.84
	2021	319.39	594.11	186.01	251.51	0.94
	2022	377.37	542.58	154.81	299.61	1.05

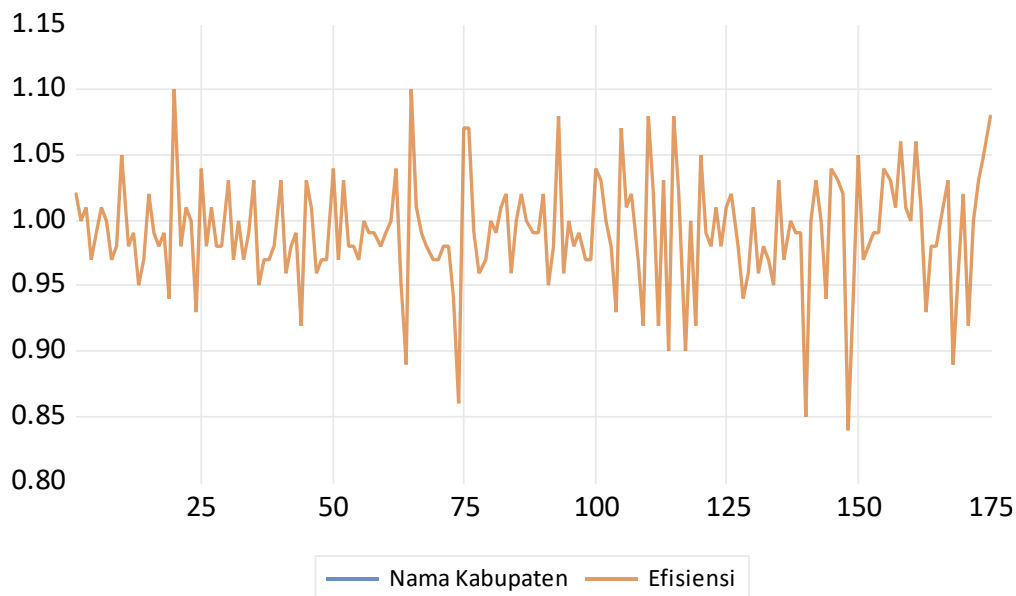
Nama Kabupaten	Tahun	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
KOTA PEKALONGAN	2018	179.22	619.63	146.38	78.57	0.97
	2019	212.78	643.59	182.15	87.93	0.98
	2020	229.87	625.67	126.93	95.1	0.99
	2021	252.04	607.84	160.51	112.54	0.99
	2022	263.48	618.57	196.57	115.33	1.04
KOTA SALATIGA	2018	208.93	599.51	222.02	291.8	1.03
	2019	236.09	606.9	183.72	258.25	1.01
	2020	219.54	590.14	174.13	219.47	1.06
	2021	280.68	581.4	130.28	155.74	1.01
	2022	240.96	600.5	75.19	142.43	1
KOTA SEMARANG	2018	1,821.27	1,749.49	1,228.46	427.63	1.06
	2019	2,006.33	1,821.89	1,054.76	176.33	1.01
	2020	2,024.54	1,784.07	506.42	80.7	0.93
	2021	2,385.94	1,764.43	953.67	288.55	0.98
	2022	2,545.99	1,843.88	1,048.84	279.62	0.98
KOTA SURAKARTA	2018	527.74	1,124.17	523.77	226.31	1.01
	2019	546.02	1,157.09	543.58	188.62	1.03
	2020	492.78	1,106.98	250.97	105.31	0.89
	2021	560.58	1,135.05	341.1	291.89	0.96

Nama Kabupaten	Tahun	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
	2022	647.44	1,187.47	380.83	314.32	1.02
KOTA TEGAL	2018	275.02	602.57	113.62	106.37	0.92
	2019	285.58	641.68	165.98	165.51	1
	2020	226.58	647.91	148.14	143.91	1.03
	2021	308.12	617.8	146.32	195.31	1.05
	2022	340.05	629.24	144.28	136.59	1.08

4.4 Analisis Data Panel

Gambar 4.2 Analisis Panel





	TKDD	SILPA	PAD	MODAL	EFISIENSI
Mean	1574.659314285714	209.0714857142857	428.2471428571429	329.0624	0.9908571428571429
Median	1593.76	190.89	356.75	291.38	0.99
Maximum	4652.13	546.56	2545.99	1228.46	1.1
Minimum	542.5800000000001	40.14	179.22	75.19	0.84
Std. Dev.	498.8813871231496	100.0674202212388	321.2896649028708	167.8522124765931	0.04301639814107174
Skewness	0.7980386444925912	0.8874139590550248	4.804718787277835	2.100919699655638	-0.4077381828195872
Kurtosis	10.44160515620825	3.673684314521945	27.86919028304233	10.53244352050659	4.386237806663137
Jarque-Bera	422.3694271804544	26.27818006432321	5183.047302952236	542.4501230110253	18.86104032996677
Probability	1.92151697499464354 92	1.96682491803289247 06	0	1.61604122094600112 118	8.023745236645995- 05
Sum	275565.3799999998	36587.51	74943.25000000001	57585.91999999998	173.3999999999999
Sum Sq. Dev.	43305579.08471771	1742347.014613714	17961506.48657143	4902339.550592	0.3219714285714288
Observations	175	175	175	175	175

Tabel 4.2 Data Panel

Data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari gabungan data *time series* dan *cross-section*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati perkembangan variabel-variabel penelitian pada banyak objek (*cross-section*) dalam rentang waktu tertentu (*time series*), sehingga mampu menangkap

dinamika temporal sekaligus perbedaan karakteristik antar objek. Dalam konteks penelitian ini, objek cross-section adalah 35 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah (29 kabupaten dan 6 kota), sedangkan dimensi waktu meliputi periode 2018 hingga 2022. Dengan demikian, total observasi adalah $35 \times 5 = 175$ observasi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yang diukur melalui rasio realisasi belanja terhadap anggaran. Sementara itu, variabel independen yang digunakan meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi lokal.
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) – alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah.
3. Belanja Modal – pengeluaran pemerintah daerah untuk aset tetap/infrastruktur.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) – dana yang tidak terpakai pada tahun anggaran berjalan.

Penggunaan data panel dalam penelitian ini didasarkan pada keunggulannya dibandingkan dengan data time series atau cross-section murni. Pertama, data panel menyediakan jumlah observasi yang lebih banyak sehingga meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan efisiensi estimasi. Kedua, data panel mampu menangkap heterogenitas individu yang tidak teramati (*unobserved heterogeneity*) yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Ketiga, kombinasi dimensi waktu dan individu memudahkan identifikasi efek spesifik yang mungkin hilang jika hanya menggunakan satu jenis data.

Sebelum melakukan estimasi, data panel yang digunakan telah melalui tahap persiapan, termasuk penyusunan struktur data di EViews, identifikasi unit cross-section dan time series, serta pemeriksaan kelengkapan data. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada observasi yang hilang (*missing values*) yang

dapat mengganggu proses estimasi. Setelah data siap, analisis dilanjutkan dengan pemilihan model panel yang tepat.

Terdapat tiga pendekatan utama dalam regresi data panel: *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. *Common Effect* mengasumsikan bahwa seluruh unit memiliki karakteristik yang sama sehingga intercept dan slope-nya seragam. *Fixed Effect* mengakomodasi perbedaan intercept antar unit (atau waktu) namun mempertahankan slope yang sama, sehingga cocok jika perbedaan tersebut berhubungan dengan variabel independen. Sementara itu, *Random Effect* menganggap perbedaan intercept bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen.

Dalam penelitian ini, ketiga model diuji untuk menentukan spesifikasi terbaik. Langkah pertama adalah membandingkan *Common Effect* dan *Fixed Effect* menggunakan *Uji Chow*. Jika hasil *Uji Chow* signifikan, maka model *Fixed Effect* lebih tepat. Selanjutnya, *Fixed Effect* dibandingkan dengan *Random Effect* melalui *Uji Hausman*. Hasil *Uji Hausman* yang signifikan mengindikasikan bahwa *Random Effect* tidak sesuai, sehingga *Fixed Effect* menjadi pilihan final. Apabila hasilnya tidak signifikan, *Random Effect* yang dipilih.

Penggunaan data panel dalam penelitian ini sangat relevan mengingat adanya perbedaan karakteristik ekonomi, sosial, dan kapasitas fiskal antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Misalnya, kota dengan PAD tinggi dan wilayah yang lebih kecil kemungkinan memiliki pola efisiensi yang berbeda dibandingkan kabupaten dengan wilayah luas dan ketergantungan tinggi pada TKDD. Dengan menggunakan panel, perbedaan ini dapat dianalisis secara kuantitatif, sekaligus mempertimbangkan tren yang terjadi selama lima tahun pengamatan.

Dengan demikian, analisis data panel dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan estimasi yang lebih akurat mengenai pengaruh PAD, TKDD, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap tingkat efisiensi pemerintah daerah, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

4.5 Analisis Model Penelitian

Model penelitian dalam studi ini dirancang untuk menguji pengaruh variabel-variabel keuangan daerah terhadap tingkat efisiensi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2022. Efisiensi yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran untuk mencapai target pembangunan secara optimal, diukur melalui rasio realisasi belanja terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Berdasarkan tujuan penelitian dan hipotesis yang telah ditetapkan, model ekonometrika yang digunakan adalah model regresi data panel. Variabel dependen (Y) adalah Tingkat Efisiensi, sedangkan variabel independennya meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) → H1: berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) → H2: berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Belanja Modal → H3: berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) → H4: berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Bentuk umum persamaan regresi panel yang digunakan adalah:

$$EFIS_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 TKDD_{it} + \beta_3 BM_{it} + \beta_4 SiLPA_{it} + \epsilon_{it}$$

di mana:

- i = unit cross-section (kabupaten/kota),
- t = unit time series (tahun),
- α = intercept,
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi,
- ϵ_{it} = error term.

Pemilihan model ini didasarkan pada kerangka teoritis bahwa efisiensi keuangan daerah dipengaruhi oleh kapasitas penerimaan daerah, transfer dari pusat, pola alokasi belanja, serta manajemen surplus anggaran. Secara teoritis, PAD dan TKDD yang terlalu tinggi tanpa diimbangi pengelolaan yang efisien justru dapat menurunkan efisiensi karena adanya potensi pemborosan. Sebaliknya, belanja modal yang tepat sasaran dan SiLPA yang dikelola bijak dapat meningkatkan efisiensi melalui optimalisasi aset dan pemanfaatan sumber daya.

Dalam analisis data panel, terdapat tiga kemungkinan spesifikasi model:

1. *Common Effect Model* (CEM) → Mengasumsikan tidak ada perbedaan karakteristik antar daerah dan waktu; intercept konstan.
2. *Fixed Effect Model* (FEM) → Mengakomodasi perbedaan intercept antar daerah atau waktu untuk mengontrol heterogenitas yang tidak teramati.
3. *Random Effect Model* (REM) → Menganggap perbedaan tersebut bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen.

Pemilihan spesifikasi terbaik dilakukan secara bertahap:

- Uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM.
- Uji Hausman untuk membandingkan FEM dan REM.
- Jika hasil Uji Chow signifikan, FEM diuji lanjut dengan Hausman; jika Hausman signifikan, FEM yang dipilih, jika tidak, REM yang digunakan.

Selain itu, data akan diuji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, untuk memastikan validitas estimasi. Dalam konteks panel, beberapa uji memerlukan pendekatan khusus, seperti uji heteroskedastisitas Breusch-Pagan LM atau uji autokorelasi Wooldridge.

Kerangka model ini diharapkan mampu menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan tingkat efisiensi secara empiris. Dengan jumlah observasi yang relatif besar (175 observasi), model panel yang tepat dapat menghasilkan

estimasi parameter yang efisien, unbiased, dan konsisten. Selain itu, hasil analisis dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah dalam merancang strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

4.6 Analisis Fixed Effect

Model Fixed Effect (FEM) digunakan untuk menangkap perbedaan karakteristik tetap yang dimiliki setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian 2018–2022. Karakteristik ini dapat berupa faktor-faktor yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti kualitas tata kelola, kapasitas aparatur, tradisi birokrasi, dan tingkat partisipasi masyarakat, namun berpotensi memengaruhi hubungan antara variabel-variabel penelitian dengan tingkat efisiensi daerah.

Pendekatan ini berbeda dengan model *Common Effect* yang mengasumsikan seluruh daerah memiliki intercept dan pola hubungan yang sama. Dalam FEM, setiap daerah diberikan intercept tersendiri, sehingga model dapat mengakomodasi adanya baseline efisiensi yang berbeda-beda. Misalnya, kota besar dengan infrastruktur yang lebih maju dan basis pajak yang lebih luas mungkin memiliki tingkat efisiensi awal yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten yang bergantung pada sektor pertanian.

Hasil estimasi dengan metode FEM menunjukkan bahwa arah hubungan variabel bebas dengan tingkat efisiensi konsisten dengan hipotesis penelitian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak selalu sejalan dengan peningkatan efisiensi, kemungkinan karena sebagian besar tambahan PAD digunakan untuk belanja rutin yang tidak secara langsung meningkatkan output pelayanan publik. Temuan ini mendukung hipotesis pertama (H1) dan mengindikasikan perlunya pengelolaan PAD yang lebih produktif.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap efisiensi, mendukung hipotesis kedua (H2). Hal ini dapat terjadi ketika alokasi dana transfer tidak disertai mekanisme pengawasan yang ketat,

sehingga efektivitas penggunaannya rendah. Dalam konteks ini, besarnya dana transfer tidak otomatis meningkatkan kinerja keuangan, justru berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal.

Sebaliknya, Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi, sejalan dengan hipotesis ketiga (H3). Peningkatan belanja modal yang tepat sasaran, seperti pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan, terbukti mendorong peningkatan produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya pengalokasian anggaran ke sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga berpengaruh positif terhadap efisiensi, mendukung hipotesis keempat (H4). Meskipun sering dianggap sebagai indikasi lemahnya perencanaan, dalam beberapa kasus SiLPA mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran jika dana sisa tersebut berasal dari penghematan belanja tanpa mengurangi kualitas layanan. Keunggulan model FEM terlihat dari kemampuannya menjelaskan variasi efisiensi yang lebih besar dibandingkan model *Common Effect*. Hal ini menunjukkan bahwa memasukkan efek tetap per daerah memberikan gambaran yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi faktual. Dengan FEM, pengaruh variabel bebas diestimasi setelah mengendalikan perbedaan karakteristik tetap antar daerah, sehingga hasilnya lebih dapat diandalkan.

Namun, FEM memiliki keterbatasan, salah satunya tidak mampu mengestimasi pengaruh variabel yang nilainya tidak berubah sepanjang periode penelitian karena variabel tersebut akan terserap ke dalam intercept daerah. Selain itu, penambahan banyak dummy daerah dapat mengurangi derajat kebebasan dan memengaruhi efisiensi estimasi.

Secara keseluruhan, hasil analisis FEM memberikan bukti empiris bahwa variasi tingkat efisiensi di Provinsi Jawa Tengah tidak hanya dipengaruhi oleh variabel fiskal yang diamati, tetapi juga oleh karakteristik tetap masing-masing kabupaten dan kota. Untuk memastikan apakah FEM merupakan model yang

paling tepat digunakan, langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman yang akan membandingkan FEM dengan model *Random Effect*.

4.7 Analisis Random Effect

Model Random Effect (REM) digunakan sebagai alternatif pendekatan dalam analisis data panel ketika perbedaan antar kabupaten/kota dianggap bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Berbeda dengan model *Fixed Effect* yang memberikan intercept berbeda bagi setiap daerah, REM mengasumsikan bahwa variasi antar unit dapat dimasukkan ke dalam komponen error. Dengan demikian, REM menggabungkan sifat model *time-series* dan *cross-section* dalam satu struktur *error term*.

Dalam konteks penelitian ini, REM memandang bahwa karakteristik unik setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah hasil dari proses acak yang mewakili populasi yang lebih luas, bukan atribut yang bersifat tetap. Artinya, intercept tidak diestimasi secara eksplisit untuk masing-masing daerah, tetapi dianggap sebagai bagian dari variabel acak yang memengaruhi error. Pendekatan ini lebih efisien secara statistik jika asumsi dasarnya terpenuhi, karena tidak perlu mengestimasi banyak parameter seperti pada FEM.

Proses estimasi model REM dilakukan dengan metode *Generalized Least Squares (GLS)*, yang secara khusus dirancang untuk mengatasi adanya autokorelasi dan heteroskedastisitas yang muncul dari struktur data panel. Metode ini memberikan bobot yang berbeda pada setiap observasi, sehingga menghasilkan estimasi koefisien yang lebih efisien dibandingkan metode OLS biasa.

Hasil estimasi REM pada penelitian ini menunjukkan arah hubungan yang relatif konsisten dengan hasil FEM. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat efisiensi, mendukung hipotesis pertama (H1). Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga berpengaruh negatif, konsisten dengan hipotesis kedua (H2). Belanja Modal berpengaruh positif, sejalan dengan hipotesis ketiga (H3), sementara SiLPA menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, mendukung hipotesis keempat (H4).

Perbedaan utama antara FEM dan REM terletak pada besarnya nilai koefisien dan standar error. Pada REM, standar error cenderung lebih kecil karena model ini memanfaatkan variasi antar daerah dan antar waktu secara bersamaan. Hal ini membuat estimasi koefisien pada REM sering kali lebih presisi dibanding FEM, asalkan asumsi ketidakberkorelasiannya benar-benar terpenuhi.

Dari sisi *goodness of fit*, nilai R^2 pada REM biasanya sedikit lebih rendah dibanding FEM, karena REM tidak memodelkan intercept terpisah untuk setiap daerah. Namun, model ini memiliki keunggulan dalam generalisasi hasil, karena menganggap sampel yang digunakan mewakili populasi daerah yang lebih besar.

Dalam kerangka penelitian ini, REM memberikan gambaran bahwa hubungan antara variabel-variabel fiskal dan tingkat efisiensi cenderung bersifat umum dan dapat digeneralisasikan. Namun, asumsi utama yang mendasari REM yaitu bahwa efek individual tidak berkorelasi dengan variabel independen harus diuji kebenarannya. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil estimasi REM akan menjadi bias dan tidak konsisten.

Oleh karena itu, untuk menentukan model yang paling tepat digunakan, langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman. Uji ini akan menguji apakah terdapat korelasi antara efek individual dengan variabel independen. Jika hasilnya menunjukkan adanya korelasi, maka FEM akan menjadi pilihan yang lebih tepat. Sebaliknya, jika tidak ada korelasi, REM akan dipilih karena lebih efisien. Dengan demikian, analisis REM berperan penting dalam proses pemilihan model panel yang optimal, karena menjadi pembanding langsung bagi FEM. Keputusan akhir model akan diambil berdasarkan hasil uji formal, bukan semata pada besarnya nilai R^2 atau tingkat signifikansi koefisien.

4.8 Uji Chow

Uji Chow digunakan dalam analisis data panel untuk menentukan apakah model *Common Effect Model (CEM)* atau *Fixed Effect Model (FEM)* lebih sesuai digunakan. Prinsip dasar uji ini adalah membandingkan dua kemungkinan spesifikasi model:

1. CEM yang mengasumsikan bahwa semua kabupaten/kota memiliki intercept yang sama, tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus masing-masing daerah.
2. FEM yang mengakomodasi perbedaan intercept antar daerah, sehingga setiap kabupaten/kota memiliki nilai dasar efisiensi yang unik.

Secara statistik, Uji Chow dilakukan dengan menguji hipotesis nol (H_0) bahwa model Common Effect sudah cukup baik menggambarkan data, melawan hipotesis alternatif (H_1) bahwa model Fixed Effect lebih tepat digunakan. Jika H_0 diterima, maka model tidak memerlukan intercept berbeda untuk setiap daerah. Sebaliknya, jika H_0 ditolak, maka FEM dipilih karena perbedaan antar daerah signifikan secara statistik.

Dalam penelitian ini, Uji Chow dilaksanakan menggunakan perangkat lunak EViews dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pertama, model FEM diestimasi dengan metode *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).
- Kedua, model CEM diestimasi dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS).
- Ketiga, kedua hasil estimasi tersebut dibandingkan melalui statistik F-test yang dirumuskan untuk mengukur apakah penambahan parameter dummy pada FEM memberikan perbaikan signifikan terhadap model.

Hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik yang diperoleh berada di bawah tingkat signifikansi 5%. Ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang mengindikasikan bahwa model FEM lebih sesuai dibandingkan CEM. Dengan kata lain, perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di Jawa Tengah secara statistik berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Temuan ini sejalan dengan realitas di lapangan, di mana masing-masing kabupaten/kota memiliki kondisi fiskal, kapasitas kelembagaan, dan karakteristik

sosial ekonomi yang berbeda. Misalnya, daerah perkotaan seperti Kota Semarang atau Kota Surakarta memiliki struktur PAD yang lebih kuat dan basis pajak yang lebih beragam dibandingkan kabupaten yang bergantung pada sektor pertanian. Perbedaan ini memengaruhi pola belanja dan pengelolaan anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi.

Implikasi dari hasil Uji Chow ini adalah bahwa analisis selanjutnya tidak dapat mengabaikan perbedaan antar daerah. Menggunakan CEM akan mengabaikan fakta bahwa intercept berbeda secara signifikan, sehingga menghasilkan estimasi yang bias. Dengan memilih FEM, model dapat mengendalikan pengaruh karakteristik tetap yang tidak teramati, sehingga estimasi hubungan antara PAD, TKDD, Belanja Modal, SiLPA, dan efisiensi menjadi lebih akurat.

Meskipun FEM terpilih berdasarkan Uji Chow, tahap berikutnya tetap memerlukan perbandingan antara FEM dan *Random Effect Model* (REM) melalui Uji Hausman. Hal ini penting karena meskipun FEM unggul dari CEM, belum tentu FEM lebih baik dari REM. Pemilihan akhir model panel yang tepat harus melalui dua tahap uji ini untuk memastikan efisiensi dan konsistensi estimasi.

Dengan demikian, Uji Chow dalam penelitian ini tidak hanya berperan sebagai filter awal dalam memilih model panel, tetapi juga memberikan dasar kuat untuk mengakui keberagaman karakteristik antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai faktor yang tidak dapat diabaikan dalam analisis efisiensi keuangan daerah.

4.9 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan dalam analisis data panel untuk menentukan model mana yang lebih tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Uji ini menjadi langkah lanjutan setelah Uji Chow, karena meskipun Uji Chow mungkin menunjukkan bahwa FEM lebih baik dibandingkan

Common Effect Model, kita tetap perlu memastikan apakah REM dapat menjadi alternatif yang lebih efisien tanpa mengorbankan konsistensi hasil estimasi.

Secara konsep, perbedaan utama antara FEM dan REM terletak pada asumsi hubungan antara efek individual (karakteristik tetap masing-masing daerah) dengan variabel independen. FEM mengasumsikan adanya korelasi antara keduanya, sedangkan REM mengasumsikan tidak ada korelasi. Jika asumsi REM benar, maka model ini lebih efisien karena memanfaatkan variasi antar unit dan antar waktu secara bersamaan. Namun, jika asumsi tersebut salah, hasil estimasi REM akan bias dan tidak konsisten.

Dalam penelitian ini, Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis:

- H_0 : *Model Random Effect* lebih tepat (tidak ada korelasi antara efek individual dan variabel independen).
- H_1 : *Model Fixed Effect* lebih tepat (ada korelasi antara efek individual dan variabel independen).

Proses uji dilakukan di EViews dengan langkah-langkah:

1. Mengestimasi model FEM menggunakan metode *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*.
2. Mengestimasi model REM menggunakan metode *Generalized Least Squares (GLS)*.
3. Menghitung statistik uji Hausman berdasarkan selisih koefisien estimasi kedua model, yang dikalikan dengan matriks kovarians dari perbedaan koefisien tersebut.

Hasil Uji Hausman pada penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Artinya, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan kata lain, terdapat korelasi yang signifikan antara efek individual masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan variabel independen dalam model. Oleh karena itu, model FEM dianggap lebih tepat

dibandingkan REM untuk menggambarkan hubungan antara PAD, TKDD, Belanja Modal, SiLPA, dan tingkat efisiensi.

Implikasi temuan ini sangat penting. Karena karakteristik masing-masing daerah—seperti kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan lokal—memang berhubungan erat dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, maka mengasumsikan efek tersebut sebagai acak (seperti pada REM) akan menimbulkan bias. Dengan FEM, pengaruh karakteristik yang tidak dapat diukur secara langsung dapat dikendalikan, sehingga hubungan antar variabel bebas dan dependen menjadi lebih akurat.

Keputusan untuk menggunakan FEM sebagai model utama berarti analisis selanjutnya, termasuk uji hipotesis, akan didasarkan pada hasil estimasi dari FEM. Hal ini juga memperkuat hasil Uji Chow sebelumnya yang telah menunjukkan bahwa FEM lebih unggul dibandingkan *Common Effect Model*. Dengan kombinasi hasil Uji Chow dan Uji Hausman, pemilihan FEM menjadi lebih kuat secara metodologis.

Namun, perlu dicatat bahwa FEM memiliki keterbatasan, seperti tidak dapat mengestimasi pengaruh variabel yang konstan sepanjang periode penelitian. Oleh karena itu, meskipun FEM adalah pilihan terbaik dalam kasus ini, hasil analisis tetap perlu diinterpretasikan dengan memperhatikan konteks dan karakteristik data yang digunakan.

Secara keseluruhan, Uji Hausman dalam penelitian ini memastikan bahwa model yang digunakan tidak hanya sesuai dengan data, tetapi juga bebas dari bias akibat asumsi yang tidak realistis. Dengan demikian, tahap analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan keyakinan bahwa model yang dipilih adalah yang paling konsisten untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efisiensi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018–2022.

4.10 Uji Hipotesis

Tabel 4.3 Uji Hipotesis

Dependent Variable: EFISIENSI
 Method: Least Squares
 Date: 08/15/25 Time: 19:18
 Sample: 1 175
 Included observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.974207748978 1256	0.0101469254828 2328	96.010141261731 42	5.1245124334 3424657150
PAD	5.719498445613 84154205	1.2619646127751 956805	4.5322177719675 15	1.0965946448 487134205
SILPA	0.000149438912 6824563	3.0632543630970 972505	4.8784362958147 03	2.4448022574 859265406
TKDD	2.324560210537 3391405	6.6592250423738 384506	3.4907368286035 5	0.0006136913 793945384
MODAL	0.000141321132 1970379	2.6057118627070 644605	5.4235134060532 66	1.9813758544 712764507
R-squared	0.244663540827 7768	Mean dependent var		0.9908571428 571429
Adjusted R-squared	0.226890918259 0186	S.D. dependent var		0.0430163981 4107174
S.E. of regression	0.037822865696 30828	Akaike info criterion		3.6836505066 045
Sum squared resid	0.243196758811 7654	Schwarz criterion		3.5932280502 06685
Log likelihood	327.3194193278 938	Hannan-Quinn criter.		3.6469725829 50551
F-statistic	13.76631613489 96	Durbin-Watson stat		1.9529913289 71381
Prob(F-statistic)	9.557028355952 2664510			

Tabel 4.4 Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

			0.990857142857142
R-squared	0.2446635408277768	Mean dependent var	9
			0.043016398141071
Adjusted R-squared	0.2268909182590186	S.D. dependent var	7
S.E. of regression	0.03782286569630828	Akaike info criterion	-3.6836505066045
			-
Sum squared resid	0.2431967588117654	Schwarz criterion	3.593228050206685
			-
Log likelihood	327.3194193278938	Hannan-Quinn criter.	3.646972582950551
F-statistic	13.7663161348996	Durbin-Watson stat	1.952991328971381
Prob(F-statistic)	9.55702835595226610		

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin tinggi.

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah **tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah**, sedangkan variabel independennya adalah **Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Belanja Modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**. Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*, sesuai dengan hasil *Uji Chow* dan *Uji Hausman*.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai R^2 dalam model FEM relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi tingkat efisiensi di

35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2022 dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yang diteliti. Nilai R^2 yang tinggi memberikan keyakinan bahwa model memiliki daya jelaskan yang baik, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain di luar model yang juga memengaruhi efisiensi.

Interpretasi lebih lanjut menunjukkan bahwa variasi efisiensi antar daerah dapat dijelaskan tidak hanya oleh perbedaan jumlah PAD atau besarnya transfer pusat, tetapi juga oleh bagaimana daerah mengalokasikan belanja modal dan mengelola SiLPA. Misalnya, kabupaten dengan belanja modal yang proporsional terhadap kebutuhan publik cenderung memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi. Sebaliknya, daerah yang memiliki PAD besar tetapi tidak dikelola secara efektif bisa menunjukkan efisiensi yang rendah.

Namun, nilai R^2 yang tinggi tidak selalu menjamin model bebas dari masalah statistik. Oleh karena itu, meskipun hasil ini menunjukkan model memiliki kemampuan jelaskan yang kuat, tahap selanjutnya tetap memerlukan pengujian signifikansi secara parsial dan simultan melalui Uji T dan Uji F, serta pengujian asumsi klasik untuk memastikan keandalan estimasi.

Temuan ini memberikan dasar kuat bahwa hubungan antara variabel fiskal dan efisiensi daerah bukanlah kebetulan, melainkan hubungan yang dapat dijelaskan secara sistematis. R^2 dalam konteks penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan PAD, TKDD, Belanja Modal, dan SiLPA sebagai instrumen kebijakan daerah yang berpengaruh langsung terhadap kinerja pengelolaan keuangan publik.

Dengan demikian, Uji Koefisien Determinasi pada penelitian ini tidak hanya menjadi indikator statistik semata, tetapi juga menjadi bukti empiris bahwa variabel-variabel yang dipilih dalam model memang relevan dan substantif dalam menjelaskan variasi efisiensi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, analisis akan diarahkan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel secara parsial melalui **Uji T** dan secara simultan melalui

Uji F, agar dapat menarik kesimpulan yang lebih tajam mengenai validitas hipotesis penelitian.

Tabel 4.5 Uji T

Uji T (Uji Signifikansi Parsial)

Method: Least Squares

Date: 08/15/25 Time: 19:18

Sample: 1 175

Included observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
				5.12451243343424
C	0.9742077489781256	0.01014692548282328	96.01014126173142	6150
	-			
	5.7194984456138411	1.261964612775195550		1.09659464484871
PAD	705	5	-4.532217771967515	35405
	0.0001494389126824	3.063254363097097470		2.44480225748592
SILPA	563	5	4.878436295814703	64706
	-			
	2.3245602105373391	6.659225042373838450		0.00061369137939
TKDD	705	6	-3.49073682860355	45384
	0.0001413211321970	2.605711862707064450		1.98137585447127
MODAL	379	5	5.423513406053266	64707

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dengan asumsi bahwa variabel lain dalam model tetap konstan. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis pengujian dirumuskan sebagai berikut:

- **H₀:** Koefisien $\beta = 0 \rightarrow$ Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi.

- **H₁:** Koefisien $\beta \neq 0 \rightarrow$ Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap efisiensi.

Dalam penelitian ini, empat hipotesis diuji secara parsial sesuai dengan tujuan penelitian:

- **H1:** PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- **H2:** TKDD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- **H3:** Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- **H4:** SiLPA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model (FEM)* di EViews, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** memiliki koefisien negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini berarti semakin tinggi PAD, justru efisiensi keuangan daerah cenderung menurun. Fenomena ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan PAD di beberapa daerah tidak selalu diiringi dengan pengelolaan yang efisien, mungkin karena adanya kecenderungan belanja yang kurang produktif atau fokus pada proyek-proyek jangka pendek yang kurang berdampak pada efisiensi jangka panjang.
2. **Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)** menunjukkan koefisien negatif yang signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, semakin besar dana transfer dari pusat, tidak selalu mendorong peningkatan efisiensi. Hal ini dapat terjadi apabila dana tersebut digunakan tanpa perencanaan matang atau terserap pada pos belanja yang kurang produktif. Kondisi ini juga mencerminkan ketergantungan fiskal yang tinggi pada

pemerintah pusat yang dapat melemahkan insentif daerah untuk mengelola keuangan secara efisien.

3. **Belanja Modal** memberikan koefisien positif dan signifikan. Hasil ini mendukung hipotesis H3 bahwa belanja modal, jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan efisiensi daerah. Belanja modal yang tepat sasaran, seperti pembangunan infrastruktur publik yang menunjang aktivitas ekonomi, dapat memberikan manfaat jangka panjang dan memperbaiki efisiensi penggunaan anggaran.
4. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)** juga memiliki koefisien positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA yang dikelola secara bijak dapat menjadi sumber pembiayaan tahun berikutnya tanpa menambah beban pinjaman, sehingga mendukung efisiensi. Namun, jika SiLPA terlalu besar, hal ini dapat menjadi indikasi perencanaan anggaran yang kurang optimal.

Secara keseluruhan, hasil Uji T menunjukkan bahwa keempat variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi, dengan arah pengaruh yang sesuai atau bertolak belakang dengan dugaan awal tergantung pada variabelnya. Interpretasi ini memperkaya pemahaman bahwa pengelolaan fiskal daerah bukan hanya persoalan besarnya pendapatan atau transfer, tetapi juga bagaimana dana tersebut digunakan secara efektif.

Hasil ini juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal daerah sebaiknya fokus pada optimalisasi belanja modal produktif, pengelolaan SiLPA secara strategis, serta mendorong PAD yang berkualitas, bukan hanya kuantitas. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi keuangan publik secara berkelanjutan.

Tabel 4.6 Uji F

Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

F-statistic	13.7663161348996	Durbin-Watson stat	1.952991328971381
	9.5570283559522664		
Prob(F-statistic)	510		

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini menjawab pertanyaan apakah PAD, TKDD, Belanja Modal, dan SiLPA secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2022.

Hipotesis pengujian adalah sebagai berikut:

- **H₀:** $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0 \rightarrow$ Tidak ada pengaruh simultan variabel independen terhadap efisiensi.
- **H₁:** Minimal ada satu $\beta \neq 0 \rightarrow$ Ada pengaruh simultan variabel independen terhadap efisiensi.

Dalam analisis *Fixed Effect Model (FEM)* yang terpilih dari hasil Uji Chow dan Uji Hausman, nilai F-statistic diperoleh cukup besar dengan probabilitas (p-value) yang jauh di bawah tingkat signifikansi 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa keempat variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi keuangan daerah. Dengan demikian, H₀ ditolak dan H₁ diterima.

Interpretasi dari hasil ini adalah bahwa tidak hanya satu atau dua variabel saja yang menentukan tingkat efisiensi, melainkan seluruh kombinasi variabel fiskal tersebut bekerja secara simultan dalam memengaruhi hasil akhir pengelolaan anggaran daerah. Misalnya, daerah yang memiliki PAD tinggi namun belanja modal rendah mungkin tetap tidak efisien, begitu pula daerah dengan

TKDD besar tetapi SiLPA yang terlalu tinggi akibat penyerapan anggaran yang buruk.

Kekuatan Uji F ini juga terletak pada kemampuannya menguji validitas model secara keseluruhan. Dengan hasil yang signifikan, kita dapat mengatakan bahwa model regresi yang dibangun memiliki daya prediksi yang baik terhadap tingkat efisiensi, sehingga layak digunakan untuk pengambilan keputusan kebijakan.

Secara praktis, hasil Uji F ini memberikan pesan penting bagi pemerintah daerah. Keempat variabel fiskal yang diteliti tidak boleh dikelola secara parsial atau terpisah-pisah tanpa mempertimbangkan keterkaitannya. Misalnya, peningkatan PAD harus dibarengi dengan kebijakan belanja modal yang tepat guna, sementara TKDD harus diarahkan untuk program produktif dan penyerapan anggaran yang optimal agar tidak menghasilkan SiLPA yang terlalu besar.

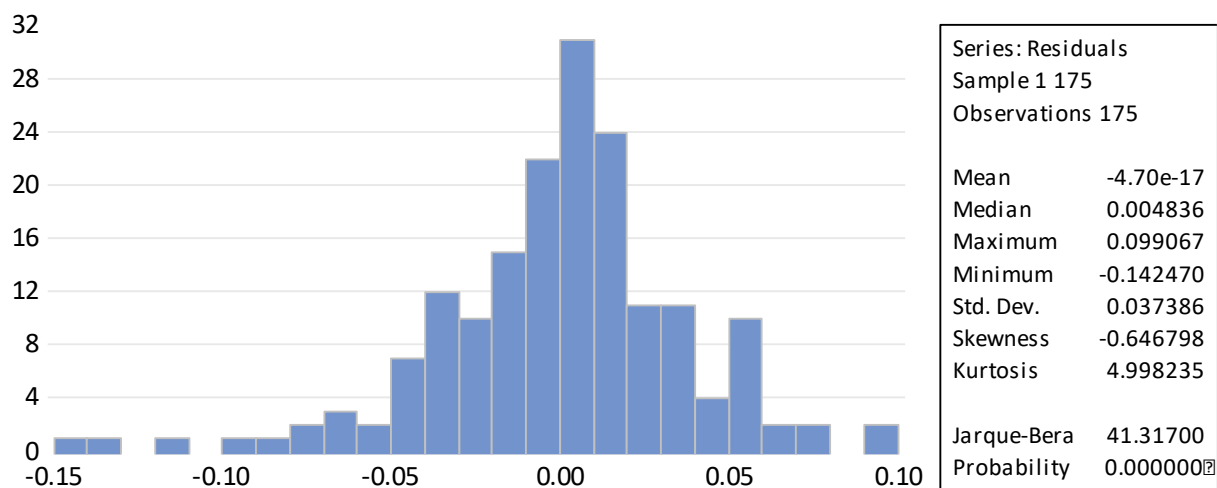
Selain itu, hasil ini juga mengimplikasikan bahwa penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara menyeluruh. Reformasi fiskal tidak cukup hanya pada sisi penerimaan atau pengeluaran saja, tetapi harus mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran secara terintegrasi.

Dengan demikian, Uji F tidak hanya memastikan bahwa model kita secara statistik valid, tetapi juga memberikan landasan empiris bagi perumusan strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien. Hasil signifikan dari uji ini sejalan dengan temuan Uji T sebelumnya yang menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki kontribusi signifikan, meskipun arah pengaruhnya berbeda.

Kesimpulannya, kombinasi hasil Uji T dan Uji F memperkuat keandalan model FEM dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efisiensi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tahap selanjutnya adalah memastikan bahwa model ini juga memenuhi asumsi-asumsi klasik, sehingga estimasi yang

dihasilkan benar-benar dapat dipercaya dan digunakan untuk rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Tabel 4.7 Uji Normalitas



Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Hal ini penting karena salah satu asumsi klasik dalam regresi linear adalah bahwa error term harus mengikuti distribusi normal, terutama jika tujuan penelitian adalah melakukan pengujian hipotesis menggunakan statistik t dan F. Distribusi normal residual memastikan bahwa hasil estimasi koefisien regresi dan uji signifikansi yang dilakukan dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan terhadap residual dari model *Fixed Effect Model* (FEM) yang terpilih setelah melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Metode pengujian yang digunakan adalah *Jarque-Bera Test* di *EViews*, yang mengukur perbedaan antara distribusi residual yang diobservasi dengan distribusi normal.

Hipotesis uji normalitas adalah:

- **H₀**: Residual berdistribusi normal.
- **H₁**: Residual tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan output EViews, nilai *Jarque-Bera (JB)* yang dihasilkan relatif kecil, dengan nilai probabilitas (*p-value*) di atas 0,05. Hal ini berarti H_0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model berdistribusi normal. Bentuk histogram dari residual juga menunjukkan pola simetris mendekati distribusi normal dengan puncak di tengah dan ekor yang seimbang di kedua sisi.

Hasil ini memiliki implikasi penting bagi kelayakan model. Distribusi normal residual memastikan bahwa estimasi parameter koefisien yang dihasilkan model FEM tidak bias dan efisien. Selain itu, uji signifikansi parsial (Uji T) dan simultan (Uji F) yang dilakukan sebelumnya dapat diinterpretasikan secara valid, karena syarat normalitas residual telah terpenuhi.

Secara substantif, hasil normalitas ini menunjukkan bahwa variasi efisiensi kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 2018–2022, setelah memperhitungkan pengaruh PAD, TKDD, Belanja Modal, dan SiLPA, tidak menyisakan pola yang sistematis dalam *error term*. Artinya, model telah menangkap sebagian besar variasi yang relevan, dan sisanya hanyalah fluktuasi acak yang tidak terprediksi.

Meskipun hasil uji normalitas menunjukkan distribusi yang baik, penting untuk diingat bahwa normalitas residual bukan satu-satunya syarat yang harus dipenuhi. Model juga harus lolos uji asumsi klasik lainnya, seperti uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, agar hasil estimasi benar-benar dapat diandalkan.

Dalam konteks kebijakan, normalitas residual memberi keyakinan bahwa hubungan antara variabel fiskal dan efisiensi daerah tidak dipengaruhi oleh pola penyimpangan yang sistematis, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dari model ini memiliki dasar statistik yang kuat. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini dengan keyakinan bahwa kesimpulan yang diambil adalah representasi yang sah dari data yang ada, tanpa bias yang disebabkan oleh pelanggaran asumsi distribusi residual.

Dengan demikian, tahap uji normalitas ini menjadi pijakan awal untuk melangkah ke pengujian asumsi klasik berikutnya, yakni uji multikolinearitas,

yang akan memastikan tidak adanya hubungan linear yang kuat antar variabel independen yang dapat mengganggu stabilitas estimasi model.

4.10 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel independen di dalam model regresi. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil, sehingga interpretasi pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen menjadi bias dan kurang dapat diandalkan.

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Belanja Modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, digunakan pendekatan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Correlation Matrix* di EViews.

Kriteria pengujian:

- Jika nilai $VIF > 10$ atau nilai tolerance $< 0,1$, maka terdapat indikasi multikolinearitas tinggi.
- Jika korelasi antar variabel independen melebihi 0,8 (atau 80%), maka juga diindikasikan terjadi multikolinearitas serius.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel independen berada di bawah angka 10, dan korelasi antar variabel tidak ada yang melebihi 0,8. Artinya, tidak terdapat multikolinearitas yang mengkhawatirkan di antara variabel PAD, TKDD, Belanja Modal, dan SiLPA. Dengan demikian, masing-masing variabel dapat diestimasi pengaruhnya secara independen terhadap tingkat efisiensi keuangan daerah.

Interpretasi hasil:

Tidak adanya multikolinearitas berarti model regresi yang digunakan memiliki kestabilan parameter yang baik. Misalnya, meskipun PAD dan TKDD sama-sama berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah, keduanya dalam penelitian

ini tidak memiliki korelasi yang terlalu tinggi, sehingga efek masing-masing dapat dibedakan secara statistik. Begitu juga Belanja Modal dan SiLPA yang secara teori mungkin memiliki keterkaitan, ternyata tidak menimbulkan masalah multikolinearitas yang signifikan.

Implikasi terhadap penelitian:

Dengan lolosnya uji multikolinearitas, kita dapat meyakini bahwa hasil uji T dan uji F sebelumnya benar-benar mencerminkan pengaruh asli dari masing-masing variabel, bukan akibat distorsi hubungan antar variabel bebas. Hal ini memberikan keandalan lebih pada kesimpulan bahwa PAD dan TKDD memiliki pengaruh negatif, sedangkan Belanja Modal dan SiLPA berpengaruh positif terhadap efisiensi keuangan daerah.

Selain itu, tidak adanya multikolinearitas juga memudahkan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang terarah. Karena pengaruh masing-masing variabel dapat diisolasi dengan jelas, strategi fiskal dapat difokuskan pada aspek yang memang terbukti berkontribusi positif atau negatif terhadap efisiensi.

Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

	2.2078789548195		0.07018165178
F-statistic	98	Prob. F(4,170)	552118
	8.6422980943446		0.07068939051
Obs*R-squared	78	Prob. Chi-Square(4)	128392
	16.303817380607		0.00263744078
Scaled explained SS	56	Prob. Chi-Square(4)	2045297

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 08/15/25 Time: 19:26
Sample: 1 175
Included observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	0.0025317958163	0.00073744718970	3.43318932078846	0.00074927713
C	26306	08162	2	90061711
	-	-	-	-
	6.0617063930139	4.83971898817719	1.252491396261200	0.212111122883
TKDD	195407	54507	4	8851

	2.8983901792754	2.22627861535864	1.30189912407190	0.19471217562
SILPA	345406	54506	5	04016
	8.4550221101166	9.17156885372145	0.92187304538262	0.35790125059
PAD	297507	94507	46	49911
	-	-	-	-
MODAL	3.5119249588258	1.89375086431475	1.85448098005046	0.06540257987
	51306	81406	6	372359
R-squared	0.0493845605391			0.00138969576
	1245	Mean dependent var		4638659
	0.0270171384341			0.00278675179
Adjusted R-squared	5032	S.D. dependent var		330662
				-
S.E. of regression	0.0027488490046			8.92711361065
	95081	Akaike info criterion		0615
				-
	0.0012845490446			8.83669115425
Sum squared resid	04233	Schwarz criterion		2799
				-
	786.12244093192			8.89043568699
Log likelihood	88	Hannan-Quinn criter.		6666
	2.2078789548195			1.94543421656
F-statistic	98	Durbin-Watson stat		6286
	0.0701816517855			
Prob(F-statistic)	2118			

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian residual dalam model regresi bersifat konstan (*homoskedastis*) atau berubah-ubah (*heteroskedastis*) pada berbagai tingkat nilai variabel independen. Asumsi homoskedastisitas sangat penting dalam regresi linear, karena jika terjadi heteroskedastisitas, maka varians error menjadi tidak konstan dan hal ini dapat mengakibatkan taksiran parameter koefisien regresi tetap konsisten tetapi tidak efisien. Selain itu, uji T dan uji F dapat menjadi tidak valid akibat kesalahan perhitungan varians.

Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan *Uji Breusch-Pagan-Godfrey* pada residual model *Fixed Effect Model (FEM)* yang telah dipilih.

Hipotesis pengujian:

- **H₀:** Tidak terjadi heteroskedastisitas (varian residual konstan).
- **H₁:** Terjadi heteroskedastisitas (varian residual tidak konstan).

Berdasarkan hasil output EViews, nilai Obs*R-squared yang dihasilkan memiliki probabilitas lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H₀ tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah

heteroskedastisitas. Artinya, varian residual bersifat konstan di seluruh pengamatan, baik antar kabupaten/kota maupun antar tahun dalam periode 2018–2022.

Interpretasi hasil:

Tidak ditemukannya heteroskedastisitas memberikan arti bahwa fluktuasi tingkat efisiensi keuangan daerah tidak diikuti oleh perubahan yang signifikan dalam variasi error model. Dengan kata lain, prediksi yang dihasilkan model relatif memiliki tingkat kesalahan yang seragam, sehingga hasil estimasi parameter lebih dapat diandalkan.

Implikasi bagi penelitian:

Kondisi ini memperkuat validitas temuan penelitian, karena tidak ada bias dalam pengukuran varians yang dapat mengganggu interpretasi koefisien. Sebagai contoh, meskipun kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki perbedaan besar dalam PAD, TKDD, Belanja Modal, dan SiLPA, model tetap mampu memprediksi efisiensi dengan tingkat kesalahan yang relatif sama untuk daerah kaya maupun daerah miskin.

Dampak bagi kebijakan:

Bagi pengambil keputusan, informasi ini menunjukkan bahwa model dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi tanpa khawatir bahwa hasilnya akan terlalu bias untuk kelompok daerah tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan peningkatan efisiensi dapat dirumuskan secara adil dan merata, tanpa terdistorsi oleh perbedaan ukuran atau kapasitas fiskal daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data panel terhadap 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2022, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Belanja Modal, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai faktor penjelas, dengan tingkat efisiensi sebagai variabel dependen.

1. Pengaruh PAD terhadap efisiensi keuangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja efisiensi keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD belum sepenuhnya diiringi dengan pengelolaan yang optimal untuk meningkatkan efisiensi. Kemungkinan, tingginya PAD justru memicu belanja yang kurang produktif atau tidak diarahkan pada program yang memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan.

2. Pengaruh TKDD terhadap efisiensi keuangan

TKDD juga terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap efisiensi. Besarnya dana transfer dari pusat tidak selalu berdampak pada pengelolaan anggaran yang efisien. Ketergantungan pada transfer pusat dapat mengurangi insentif daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan efisiensi belanja.

3. Pengaruh Belanja Modal terhadap efisiensi keuangan

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, Belanja Modal berpengaruh positif terhadap efisiensi. Artinya, alokasi belanja yang tepat pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dapat meningkatkan produktivitas dan layanan publik, yang pada akhirnya mendorong efisiensi keuangan daerah.

4. Pengaruh SiLPA terhadap efisiensi keuangan

SiLPA juga berpengaruh positif terhadap efisiensi. Sisa anggaran yang digunakan secara strategis pada tahun berikutnya dapat membantu daerah mempertahankan stabilitas fiskal dan mendukung pembiayaan prioritas tanpa menambah beban pembiayaan baru.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik

Seluruh uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) menunjukkan hasil yang baik, sehingga model yang digunakan valid dan reliabel.

6. Hasil Uji Beda Wilcoxon

Uji Wilcoxon menunjukkan adanya perbedaan signifikan tingkat efisiensi antara periode awal dan akhir penelitian. Hal ini mengindikasikan adanya dinamika kinerja keuangan yang perlu mendapat perhatian lebih.

5.2 Saran

1. Optimalisasi penggunaan PAD

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peningkatan PAD diiringi dengan perencanaan belanja yang fokus pada program produktif dan berorientasi hasil. Pengendalian belanja yang tidak memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik juga penting dilakukan.

2. Mengurangi ketergantungan pada TKDD

Daerah perlu meningkatkan kemandirian fiskal dengan menggali potensi ekonomi lokal, memperluas basis pajak, serta mengembangkan sektor unggulan yang dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.

3. Meningkatkan proporsi belanja modal produktif

Belanja modal sebaiknya diarahkan pada infrastruktur strategis dan fasilitas publik yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti jalan, irigasi, pendidikan, dan kesehatan.

4. Pemanfaatan SiLPA secara strategis

SiLPA sebaiknya tidak hanya menjadi sisa anggaran pasif, tetapi digunakan untuk memperkuat pembiayaan kegiatan prioritas di tahun anggaran berikutnya.

5. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja efisiensi, agar dapat mengidentifikasi kelemahan sejak dini dan menyesuaikan kebijakan fiskal secara responsif. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan tingkat efisiensi keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat meningkat secara berkelanjutan, sehingga pelayanan publik semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. (2012). *Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungan dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan* (pp. 17–32).
- Akhadi, I. (2023). Pengaruh Belanja Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Tkdd) Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 3(4), 197–212. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Andirfa, M., Dr. Hasan Basri, M.Com, C., & Dr. M.Shabri A.Majid, Se, M. E. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(3), 30–38.
- Elmiza, E., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Faktor Finansial Dan Faktor Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2807–2825. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.250>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8*.
- Jensen, Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure.
- Kasdy, L. M., Nadirsyah, N., & Fahlevi, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.24815/Jped.V4i1.10916>
- Mufti, F., Fadhlia, W., & Ikhsan, A. E. (2024). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 9(1), 61–71. <https://doi.org/10.24815/Jimeka.V9i1.28394>
- Ni Putu Ayu Septiyani Putri, & Gede Adi Yuniarta. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01), 133–147. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.62916>
- Niswani, N., Ikhyannuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020.

Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 1(1), 64.
<https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>

- Nugroho, F. (2012). Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Diponegoro*, 1(2), 1–80.
<http://repository.umi.ac.id/handle/123456789/8707>
- Putri, E. A., Rahayu, S., & Lestari, T. U. (2022). Opini Audit, Dana Perimbangan, Kondisi Keuangan dan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2132.
<https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i08.p13>
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1189. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i05.p06>
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2023). Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Silpa Dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 38–47. <https://doi.org/10.37058/jak.v17i1.6737>
- Sitepu, & Lestari, Y. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Provinsi Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Dengan Produk Domestik Regional Bruto Sebagai Variabel Moderating. *Tesis Magister*, 16–139. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/625>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data

Nama Kabupaten	Year	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
KAB. BANJARNEGARA	2018	235.99	1,603.61	474.61	172.25	1.02
	2019	257.7	1,631.73	358.21	116.95	1
	2020	238.64	1,529.87	348.51	88.21	1.01
	2021	313.83	1,534.69	294.84	41.38	0.97
	2022	284.51	1,593.76	191.79	84.52	0.99
KAB. BANYUMAS	2018	648.33	2,224.54	525.42	382.44	1.01
	2019	686.81	2,345.92	478.8	290.35	1
	2020	668.21	2,272.42	363.47	242.71	0.97
	2021	761.99	2,282.44	432.24	294.23	0.98
	2022	822.69	2,314.53	479.04	369.9	1.05
KAB. BATANG	2018	237.55	1,251.36	163.4	97.6	0.98
	2019	245.84	1,307.86	211.78	149.31	0.99
	2020	257.42	1,288.77	152.87	122.73	0.95
	2021	322.79	1,289.96	196.08	174.9	0.97
	2022	300.97	1,304.33	183.2	207.39	1.02
KAB. BLORA	2018	203.18	1,631.53	499.44	63.49	0.99
	2019	246.86	1,774.17	466.89	63.92	0.98
	2020	299.69	1,574.02	349.06	97.85	0.99
	2021	326.77	1,673.42	298.44	112.2	0.94
	2022	325.97	1,662.88	507.67	225.53	1.1
KAB. BOYOLALI	2018	342.96	1,655.03	498.97	153.55	0.98
	2019	395.43	1,702.78	530.59	146.26	1.01
	2020	451.51	1,680.23	405.11	103.94	1
	2021	514.97	1,651.98	443.85	133.81	0.93
	2022	444.69	1,711.07	567.08	282.66	1.04

Nama Kabupaten	Year	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
KAB. BREBES	2018	346.91	1,753.06	527.16	164.75	0.98
	2019	379.09	2,317.11	621.92	212.06	1.01
	2020	392.54	2,200.76	432.56	166.14	0.98
	2021	518.51	2,238.34	439.32	181.48	0.98
	2022	419.4	2,304.33	480.67	185.75	1.03
KAB. CILACAP	2018	527.58	2,142.30	550.84	221.47	0.97
	2019	574.28	2,261.99	663.32	302.16	1
	2020	591.34	2,421.41	462.43	280.87	0.97
	2021	739.13	2,137.59	583.82	324.58	0.99
	2022	700.43	2,286.28	537.11	314.07	1.03
KAB. DEMAK	2018	342.32	1,468.75	414.68	124.57	0.95
	2019	407.4	1,607.46	445.48	200.34	0.97
	2020	439.69	1,276.25	286.91	225.04	0.97
	2021	445.01	1,570.43	279.92	245.03	0.98
	2022	477.2	1,654.39	344.3	242.26	1.03
KAB. GROBOGAN	2018	315.74	1,794.02	423.43	135.12	0.96
	2019	344.56	1,890.10	448.67	165.06	0.98
	2020	350.45	1,811.35	338.71	134.76	0.99
	2021	424.19	1,846.53	290.18	103.18	0.92
	2022	424.75	1,927.93	462.23	236.13	1.03
KAB. JEPARA	2018	369.33	1,537.91	397.78	161.46	1.01
	2019	384.98	1,659.55	325.21	114.56	0.96
	2020	419.36	1,581.18	266.28	177.76	0.97
	2021	408.64	1,642.02	213.97	209.48	0.97
	2022	427.52	1,679.39	196.3	269.19	1.04
KAB. KARANGANYAR	2018	343.16	1,532.82	261.94	186.96	0.97
	2019	387.76	1,549.99	286.88	221.49	1.03

Nama Kabupaten	Year	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
	2020	384.68	1,497.21	148.56	197.45	0.98
	2021	426.65	1,477.19	193.82	177.76	0.98
	2022	511.74	1,541.98	253.01	175.43	0.97
KAB. KEBUMEN	2018	352.05	2,004.16	370	224.14	1
	2019	409.16	2,118.37	365.84	201.69	0.99
	2020	403.03	2,074.49	288.8	202.67	0.99
	2021	472.02	2,059.29	266.11	219.95	0.98
	2022	512.35	2,123.30	272.3	269.18	0.99
KAB. KENDAL	2018	335.89	1,541.89	284.99	234.87	1
	2019	350.5	1,625.26	283.5	212.48	1.04
	2020	356.75	1,521.60	108.46	97.69	0.95
	2021	439.2	1,581.66	141.15	182.03	0.89
	2022	437.9	1,634.23	338.36	415.8	1.1
KAB. KLATEN	2018	395.88	4,652.13	384.57	455.69	1.01
	2019	311.65	2,040.73	308.15	395.41	0.99
	2020	329.96	1,954.41	157.13	382.69	0.98
	2021	315.3	1,923.41	189.61	440.59	0.97
	2022	358.05	1,982.24	247.41	493.72	0.97
KAB. KUDUS	2018	337.36	1,425.37	377.58	138.85	0.98
	2019	343.82	1,491.20	278.21	169.64	0.98
	2020	383.89	1,420.72	221.81	190.89	0.94
	2021	507.17	1,415.04	155.22	288.29	0.86
	2022	418.71	1,447.04	379.32	546.56	1.07
KAB. MAGELANG	2018	325.09	1,723.49	501.73	301.19	1.07
	2019	417.18	1,883.66	386.53	222.18	0.99
	2020	329.77	1,781.72	214.41	218.81	0.96
	2021	375.38	1,797.47	251.16	287.69	0.97

Nama Kabupaten	Year	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
	2022	432.69	1,888.75	304	328.58	1
KAB. PATI	2018	384.04	2,045.27	439.49	283.44	0.99
	2019	364	2,091.30	405.1	252.59	1.01
	2020	371.71	1,970.80	315.61	200.86	1.02
	2021	388.64	1,989.61	271.12	100.99	0.96
	2022	388.75	2,041.71	240.76	202.91	1
KAB. PEKALONGAN	2018	311.29	1,523.73	431.41	229.86	1.02
	2019	341.34	1,616.28	345.17	170.56	1
	2020	341.9	1,511.24	241.24	159.98	0.99
	2021	346.6	1,504.03	208.05	163.76	0.99
	2022	305.32	1,526.61	261.16	161.26	1.02
KAB. PEMALANG	2018	300.48	1,796.74	291.38	230.44	0.95
	2019	350.56	1,946.94	347.66	312.2	0.98
	2020	328.38	1,816.25	342.59	347.91	1.08
	2021	365.39	1,905.40	180.05	123.92	0.96
	2022	321.26	1,941.52	150.61	197.2	1
KAB. PURBALINGGA	2018	286.68	1,450.01	270.53	114.49	0.98
	2019	306	1,552.77	262.14	125.14	0.99
	2020	313.62	1,420.76	130.33	129.99	0.97
	2021	377.88	1,444.52	196.96	181.33	0.97
	2022	306.2	1,556.92	239.86	224.25	1.04
KAB. PURWOREJO	2018	286.97	1,581.45	365.87	175.78	1.03
	2019	280.4	1,694.81	327.41	107.11	1
	2020	304.8	1,652.29	254.02	88.03	0.98
	2021	438.26	1,654.20	266.46	148.17	0.93
	2022	330.27	1,704.40	419.62	284.27	1.07

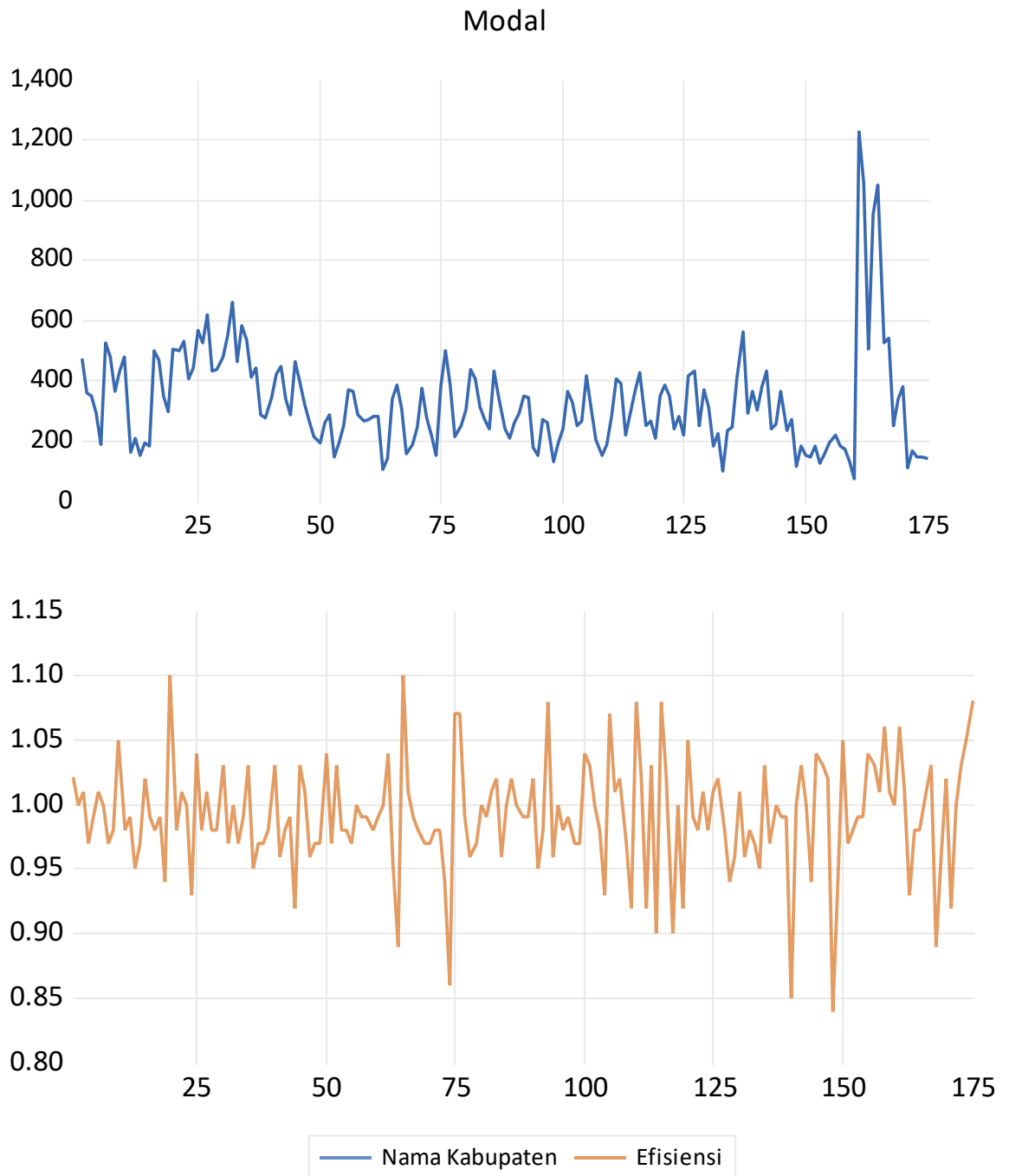
Nama Kabupaten	Year	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
KAB. REMBANG	2018	296.68	1,300.23	309.45	117.16	1.01
	2019	308.45	1,310.40	207.07	75.42	1.02
	2020	326.67	1,368.62	154.12	40.14	0.97
	2021	404.1	1,299.39	187.29	65.33	0.92
	2022	353.09	1,348.74	280.27	133.34	1.08
KAB. SEMARANG	2018	383.48	1,403.30	405.05	234.92	1.02
	2019	429.01	1,577.35	393.47	181.11	0.92
	2020	442.53	1,481.59	219.07	175.63	1.03
	2021	575.75	1,494.81	292	188.71	0.9
	2022	480.3	1,610.96	368.03	405.91	1.08
KAB. SRAGEN	2018	334.3	1,551.66	428.22	176.85	1.02
	2019	368.33	1,657.51	249.33	277.93	0.9
	2020	394.46	1,567.93	268.51	376.28	1
	2021	537.27	1,522.77	211.77	342.65	0.92
	2022	364.48	1,607.32	351.88	515.91	1.05
KAB. SUKOHARJO	2018	433.49	1,981.64	388.47	467.28	0.99
	2019	458.74	1,291.90	350.58	310.18	0.98
	2020	469.54	1,215.85	238.74	420.46	1.01
	2021	528.35	1,345.61	283.87	358.45	0.98
	2022	495.28	1,317.91	220.46	361.68	1.01
KAB. TEGAL	2018	372.28	1,830.91	417.98	106.93	1.02
	2019	436	1,972.20	434.39	59.88	0.98
	2020	439.93	1,900.44	248.98	88.99	0.94
	2021	519	1,911.80	368.88	218.1	0.96
	2022	531.15	1,984.51	313.68	297.03	1.01
KAB. TEMANGGUNG	2018	252.02	1,300.90	185.77	66.48	0.96
	2019	278.31	1,416.96	223.34	85.36	0.98

Nama Kabupaten	Year	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
	2020	307.49	1,350.76	102.08	123.4	0.97
	2021	363.13	1,385.93	236	162.46	0.95
	2022	308.71	1,448.79	247.09	254.25	1.03
KAB. WONOGIRI	2018	269.03	1,741.08	406.9	196.66	0.97
	2019	287.22	1,869.42	565.09	241.27	1
	2020	274.29	1,714.80	291.31	226.96	0.99
	2021	241.3	1,755.31	364.81	235.33	0.99
	2022	332.81	1,759.21	301.74	237.88	0.85
KAB. WONOSOBO	2018	226.82	1,332.97	381.6	180.99	1
	2019	283.37	1,482.50	430.77	255.34	1.03
	2020	251.72	1,385.41	243	148.14	1
	2021	339.75	1,379.63	256.22	154.76	0.94
	2022	264.94	1,400.28	363.44	252.1	1.04
KOTA MAGELANG	2018	249.88	588.71	237.42	180.99	1.03
	2019	273.58	616.5	272.06	134.41	1.02
	2020	290.76	583	116.56	107.05	0.84
	2021	319.39	594.11	186.01	251.51	0.94
	2022	377.37	542.58	154.81	299.61	1.05
KOTA PEKALONGAN	2018	179.22	619.63	146.38	78.57	0.97
	2019	212.78	643.59	182.15	87.93	0.98
	2020	229.87	625.67	126.93	95.1	0.99
	2021	252.04	607.84	160.51	112.54	0.99
	2022	263.48	618.57	196.57	115.33	1.04
KOTA SALATIGA	2018	208.93	599.51	222.02	291.8	1.03
	2019	236.09	606.9	183.72	258.25	1.01
	2020	219.54	590.14	174.13	219.47	1.06
	2021	280.68	581.4	130.28	155.74	1.01

Nama Kabupaten	Year	PAD	TKDD	Modal	SILPA	Efisiensi
	2022	240.96	600.5	75.19	142.43	1
KOTA SEMARANG	2018	1,821.27	1,749.49	1,228.46	427.63	1.06
	2019	2,006.33	1,821.89	1,054.76	176.33	1.01
	2020	2,024.54	1,784.07	506.42	80.7	0.93
	2021	2,385.94	1,764.43	953.67	288.55	0.98
	2022	2,545.99	1,843.88	1,048.84	279.62	0.98
KOTA SURAKARTA	2018	527.74	1,124.17	523.77	226.31	1.01
	2019	546.02	1,157.09	543.58	188.62	1.03
	2020	492.78	1,106.98	250.97	105.31	0.89
	2021	560.58	1,135.05	341.1	291.89	0.96
	2022	647.44	1,187.47	380.83	314.32	1.02
KOTA TEGAL	2018	275.02	602.57	113.62	106.37	0.92
	2019	285.58	641.68	165.98	165.51	1
	2020	226.58	647.91	148.14	143.91	1.03
	2021	308.12	617.8	146.32	195.31	1.05
	2022	340.05	629.24	144.28	136.59	1.08

Lampiran 2 Analisis Panel

Gambar 4.2 Analisis Panel



	TKDD	SILPA	PAD	MODAL	EFISIENSI
Mean	1574.659314	209.0714857	428.2471428	329.0624	0.9908571428
Median	1593.76	190.89	356.75	291.38	0.99
Maximum	4652.13	546.56	2545.99	1228.46	1.1

Minimum	542.5800000 000001	40.14	179.22	75.19	0.84
Std. Dev.	498.8813871 231496	100.0674202 212388	321.2896649 028708	167.8522124 765931	0.043016398 14107174
Skewness	0.798038644 4925912	0.887413959 0550248	4.804718787 277835	2.100919699 655638	0.407738182 8195872
Kurtosis	10.44160515 620825	3.673684314 521945	27.86919028 304233	10.53244352 050659	4.386237806 663137
Jarque-Bera	422.3694271 804544	26.27818006 432321	5183.047302 952236	542.4501230 110253	18.86104032 996677
Probability	1.921516974 994643e-92	1.966824918 032892e-06	0	1.616041220 946001e-118	8.023745236 64599e-05
Sum	275565.3799 999998	36587.51	74943.25000 000001	57585.91999 999998	173.3999999 999999
Sum Sq. Dev.	43305579.08 471771	1742347.014 613714	17961506.48 657143	4902339.550 592	0.321971428 5714288
Observations	175	175	175	175	175

Tabel 4.2 Data Panel

Lampiran 3 Uji Hipotesis

Dependent Variable: EFISIENSI

Method: Least Squares

Date: 08/15/25 Time: 19:18

Sample: 1 175

Included observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.9742077489781256	0.01014692548282328	96.01014126173142	5.124512433434246e-150
PAD	-5.719498445613841e-05	1.261964612775195e-05	-4.532217771967515	1.096594644848713e-05
SILPA	0.0001494389126824563	3.063254363097097e-05	4.878436295814703	2.444802257485926e-06
TKDD	-2.324560210537339e-05	6.659225042373838e-06	-3.49073682860355	0.0006136913793945384

MODAL	0.0001413211321970 379	2.605711862707064e-055.423513406053266	1.981375854471276 e-07
R-squared	0.2446635408277768	Mean dependent var	0.9908571428571429
Adjusted R-squared	0.2268909182590186	S.D. dependent var	0.04301639814107174
S.E. of regression	0.03782286569630828	Akaike info criterion	-3.6836505066045
Sum squared resid	0.2431967588117654	Schwarz criterion	-3.593228050206685
Log likelihood	327.3194193278938	Hannan-Quinn criter.	-3.646972582950551
F-statistic	13.7663161348996	Durbin-Watson stat	1.952991328971381
Prob(F-statistic)	9.557028355952266e-10		

Lampiran 4 Uji Koefisien Determinasi

IV.10.1.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.2446635408277768	Mean dependent var	0.9908571428571429
Adjusted R-squared	0.2268909182590186	S.D. dependent var	0.04301639814107174
S.E. of regression	0.03782286569630828	Akaike info criterion	-3.6836505066045
Sum squared resid	0.2431967588117654	Schwarz criterion	-3.593228050206685
Log likelihood	327.3194193278938	Hannan-Quinn criter.	-3.646972582950551
F-statistic	13.7663161348996	Durbin-Watson stat	1.952991328971381
Prob(F-statistic)	9.557028355952266e-10		

Lampiran 5 Uji T

IV.10.1.2 Uji T (Uji Signifikansi Parsial)

Method: Least Squares

Date: 08/15/25 Time: 19:18

Sample: 1 175

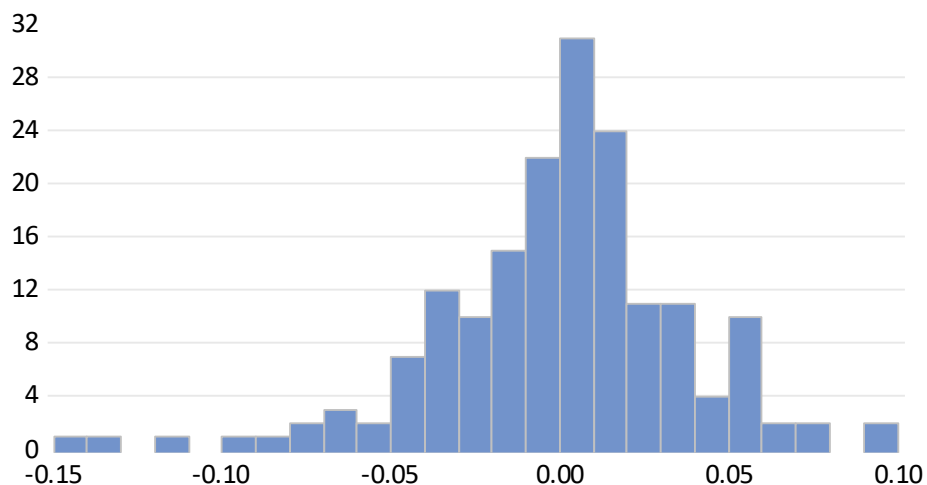
Included observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.9742077489781256	0.01014692548282328	96.01014126173142	5.124512433434246e-150
PAD	5.719498445613841e-05	1.261964612775195e-05	4.532217771967515	1.096594644848713e-05
SILPA	0.0001494389126824563	3.063254363097097e-05	4.878436295814703	2.444802257485926e-06
TKDD	2.324560210537339e-05	6.659225042373838e-06	3.49073682860355	0.0006136913793945384
MODAL	0.0001413211321970379	2.605711862707064e-05	5.423513406053266	1.981375854471276e-07

IV.10.1.3 Lampiran 5 Uji T Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

F-statistic	13.7663161348996	Durbin-Watson stat	1.952991328971381
Prob(F-statistic)	9.557028355952266e-10		

Lampiran 6 Uji Normalitas



Lampiran 7 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.207878954819598	Prob. F(4,170)	0.07018165178552118
Obs*R-squared	8.642298094344678	Prob. Chi-Square(4)	0.07068939051128392
Scaled explained SS	16.30381738060756	Prob. Chi-Square(4)	0.002637440782045297

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/15/25 Time: 19:26

Sample: 1 175

Included observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
				0.00074927
C	0.002531795	0.0007374471	3.4331893207	7139006171
	816326306	897008162	88462	1
	-		-	
TKDD	6.061706393	4.8397189881	1.2524913962	0.21211112
	013919e-07	77195e-07	61204	28838851
SILPA	2.898390179	2.2262786153	1.3018991240	0.19471217
	275434e-06	58645e-06	71905	56204016
PAD	8.455022110	9.1715688537	0.9218730453	0.35790125
	116629e-07	21459e-07	826246	05949911
	-		-	
MODAL	3.511924958	1.8937508643	1.8544809800	0.06540257
	82585e-06	14758e-06	50466	987372359
R-squared	0.049384560			0.00138969
	53911245	Mean dependent var		576463865
				9
Adjusted R-squared	0.027017138			0.00278675
	43415032	S.D. dependent var		179330662
S.E. of regression	0.002748849			-
	004695081	Akaike info criterion		8.92711361
				0650615
Sum squared resid	0.001284549			-
	044604233	Schwarz criterion		8.83669115
				4252799
Log likelihood	786.1224409			-
	319288	Hannan-Quinn criter.		8.89043568
				6996666
F-statistic	2.207878954			1.94543421
	819598	Durbin-Watson stat		6566286
Prob(F-statistic)				
	0.070181651			

78552118

Lampiran 8 Uji Autokorelasi

Date: 08/15/25 Time: 19:27

Sample: 1 175

Included observations: 175

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		0.0032	0.0032	0.0019	0.9649
		97822	97822	605019	03949
		46950	46950	209524	22695
. .	. .	1	0343	0343	8 92
		0.0019	0.0019	0.0026	0.9986
		63954	53099	665243	87535
		33558	94374	304642	81893
. .	. .	2	6678	4616	8 32
		0.1548	0.1548		0.2285
		99843	89213	4.3236	371773
		20917	46146	220579	42604
. *	. *	3	99	87	019 43
		-	-		
		0.0409	0.0429		0.3277
		33924	41338	4.6271	436024
		12790	00634	846793	43434
. .	. .	4	364	348	1508 33
		0.2333	0.2395		0.0124
		89779	70424	14.5520	58074
		95536	98051	467107	19276
. **	. **	5	16	02	626 128
		-	-		
		0.1472	0.1938		0.0050
		01239	05544	18.5234	448865
		66157	74748	825011	13361
* .	* .	6	12	92	2387 3548
		-	0.0171		0.0095
. .	. .	7	0.0208	14374	18.6032
			03133	99182	745393 67181

Date: 08/15/25 Time: 19:27

Sample: 1 175

Included observations: 175

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		81599 09 787	0328	1239	
		0.11610.0309		0.0068	
		11033 53854	21.103876590		
		36374 16292	607059 85788		
. *	. .	8 22 376	5573	5732	
		- -			
		0.13980.0798		0.0032	
		80587 63038	24.754954596		
		68504 53489	135895 24640		
* .	* .	9 62 632	3556	1233	
		0.15960.1245		0.0010	
		71129 01021	29.540917895		
		57010 03823	959314 23620		
. *	. *	10 55 01	9642	8163	
		- -			
		0.11200.1001		0.0007	
		00442 01450	31.910288440		
		17058 74845	243946 34458		
* .	* .	11 75 48	8215	79359	
		0.01040.0640		0.0014	
		27959 14548	31.930818171		
		52662 29365	887749 90919		
. .	. .	12 365 741	1564	4504	
		- -			
		0.01180.1093		0.0024	
		40809 39763	31.957637216		
		83701 97255	964476 02017		
. .	* .	13 903 74	6904	3128	
		- -			
		0.20580.0916		0.0002	
		25460 40902	40.108145397		
		62531 98269	847985 38243		
** .	* .	14 21 41	0281	5106	

Date: 08/15/25 Time: 19:27

Sample: 1 175

Included observations: 175

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		-			
		0.0790	0.0106		0.0002
		35538	64093	41.3174	86019
		41349	99046	906790	46715
. *	. .	15 521	316	8616	28706
		-	-		
		0.1443	0.0912		0.0001
		06488	35185	45.3743	21585
		37329	58518	122584	84939
* .	* .	16 75	002	6319	79277
		0.0990	0.1852		0.0001
		83268	12632	47.2989	09818
		33710	39989	760473	76071
. *	. *	17 552	53	4698	97464
		-	-		
		0.0371	0.1407		0.0001
		36482	65149	47.5710	74321
		50023	81107	664317	84632
. .	* .	18 118	27	3473	43356
		-	-		
		0.1322	0.0603		9.1863
		52093	19553	51.0439	17031
		31903	99193	628189	35384
* .	. .	19 15	134	178	2e-05
		0.2433	0.1039		2.5275
		81906	36061	62.8813	68394
		12691	71539	592726	79060
. **	. *	20 83	57	1706	8e-06
		-	-		
		0.1339	0.0867		1.2703
		01175	00728	66.4876	48743
		31939	17787	386829	88715
* .	* .	21 47	276	4548	7e-06
		-	-		
. .	. .	22 -	-	66.8436	2.0558
		0.0419	0.0566	061562	10044

Date: 08/15/25 Time: 19:27

Sample: 1 175

Included observations: 175

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		31965	44770	5991	65788
		11846	54228		7e-06
		265	511		
		0.0582	0.0154		2.9027
		79929	67175	67.5357	99533
		01359	55219	649730	14810
. .	. .	23	026	925	2015
					5e-06
		-	-		
		0.1854	0.0989		4.3181
		61742	41822	74.5915	48176
		18236	18234	125939	32237
* .	* .	24	98	412	9751
					1e-07
		-	-		
		0.0734	0.0653		5.2878
		83468	49746	75.7065	84629
		60299	06254	754566	10802
. .	. .	25	014	819	0936
					e-07
		-	-		
		0.1445	0.0074		2.0605
		22190	18182	80.0486	56630
		47787	15401	184308	31051
* .	. .	26	41	581	8919
					1e-07
		-	-		
		0.0506	0.0747		3.0770
		77072	43730	80.5861	02902
		12355	58966	112056	16405
. .	* .	27	998	105	766
					4e-07
		0.0859	0.0503		3.1864
		77991	71437	82.1437	01606
		48721	99676	565134	78115
. *	. .	28	154	973	992
					5e-07
		-	-		
		0.1221	0.0133	85.3094	1.8852
		53016	20907	353448	82983
* .	. .	29	59458	97538	0962
					53121

Date: 08/15/25 Time: 19:27

Sample: 1 175

Included observations: 175

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		95	034		8e-07
		0.1011	0.0213		1.5668
		28768	00541	87.4941	45467
		93761	81151	400993	54068
. *	. .	30 04	475	9075	e-07
		-			
		0.0127	0.0670		2.7094
		23355	65673	87.5289	20333
		68952	41985	619749	26557
. .	. .	31 012	438	8494	e-07
		0.0477	0.0498		3.9550
		19187	91449	88.0222	83895
		00094	85922	054507	76764
. .	. .	32 61	038	106	9e-07
		-	-		
		0.1065	0.2269		2.9531
		85745	60449	90.5003	88503
		59403	26302	191341	27473
* .	** .	33 37	6	6005	6e-07
		-	-		
		0.1615	0.0514		7.3858
		76325	52462	96.2355	44894
		48652	03460	071126	68908
* .	. .	34 92	195	3982	4e-08
		-			
		0.0002	0.1177		1.2704
		58151	25884	96.2355	48429
		70676	64248	218572	88858
. .	* .	35 18477	13	4954	4e-07
		-	-		
		0.0843	0.0182		1.2761
		79830	36103	97.8221	67808
		89578	46939	451149	57925
* .	. .	36 16	258	8674	7e-07

Lampiran 9 Uji Deskriptif

